

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum	I-6
C. Maksud dan Tujuan	I-7
D. Keluaran Kegiatan	I-7
E. Ruang Lingkup	I-8
F. Sistematika Laporan Pendahuluan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	II-1
A. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	III-1
A. Monitoring dan Evaluasi	III-1
B. Tahapan Pengembangan Ekonomi Lokal	III-10
C. Tahapan pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Surakarta .	III-12
D. Metode Penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal	III-15
BAB IV ANALISIS SOAR INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA.....	IV-1
A. Kondisi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta	IV-1
B. Analisis SOAR	IV-6
BAB V RENCANA AKSI TAHUNAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	V-1
A. Telaah RPJMD dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	V-1

B. Identifikasi Program dan Kegiatan Renstra OPD yang Mendukung terhadap PEL	V-8
C. Rencana Bisnis Pengembangan Klaster Usaha	V-13
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	VI-1
A. Konsep Monitoring dan Evaluasi	VI-1
B. Format Monitoring dan Evaluasi Rencana Bisnis Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta	VI-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah	II-13
Gambar 2.2	Bagan Alir Verifikasi Rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah	II-18
Gambar 3.1	Peta Kota Surakarta	III-2
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Kota di Sekitarnya 2014	III-11
Gambar 3.3	Perbandinga Laju Inflasi Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015	III-18
Gambar 3.4	Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dengan Kota/kab Lain Di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015	III-19
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2011 – 2014 ...	III-21
Gambar 3.6	Perbandingan presentase kemiskinan Kota Surakarta dengan Kabupaten/kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2014.....	III-22
Gambar 3.7	Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kota Surakarta Tahun 2014	III-23
Gambar 3.8	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2014.....	III-24
Gambar 3.9	Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta dengan Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ...	III-26
Gambar 3.10	Perbandingan Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta dengan kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	III-27
Gambar 3.11	Perbandingan angka harapan hidup Kota Surakarta dengan kota lain di sekitarnya Tahun 2014	III-28
Gambar 3.12	Perbandingan harapan lama sekolah Kota Surakarta dengan kota lain di sekitarnya Tahun 2014	III-29
Gambar 3.13	Perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dengan kota lain di sekitarnya Tahun 2014	III-30

Gambar 3.14	Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dengan kota lain di sekitarnya Tahun 2014	III-31
Gambar 3.15	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dengan Kabupaten/kota lain di Jawa Tengah Tahun 2014	III-32
Gambar 3.16	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dengan kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2014	III-33
Gambar 3.17	Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Surakarta dan Kota Lain di sekitarnya Tahun 2014	III-34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	III-1
Tabel 3.2	Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2012-2015	III-8
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2011-2015	III-9
Tabel 3.4	Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2015	III-10
Tabel 3.5	Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015	III-11
Tabel 3.6	PDRB Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Tahun 2011-2015 (juta Rp).....	III-15
Tabel 3.7	PDRB Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (juta Rp)	III-16
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-17
Tabel 3.9	Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	III-25
Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Surakarta Tahun 2011-2015	III-32
Tabel 4.1	Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2016	IV-2
Tabel 4.2	Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta Tahun 2016	IV-3
Tabel 4.3	Kapasitas dan Nilai Produksi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta Tahun 2016	IV-5
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Renstra OPD yang Mendukung terhadap Klaster Industri di Kota Surakarta Tahun 2018-2021	V-11

Tabel 5.2	Rencana Bisnis Pengembangan Klastern Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta Tahun 2018-2022	V-14
Tabel 6.1	Form Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun dari Sisi Pemerintah	VI-11
Tabel 6.2	Form Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun dari Sisi Pelaku Usaha	VI-14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia sedang disibukkan dengan maraknya isu tentang globalisasi; sebuah keadaan yang kini telah menghilangkan batasan diantara dua wilayah atau negara. Era globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari globalisasi ekonomi adalah pasar bebas. Dalam kaitannya dengan hal Indonesia telah menandatangani beberapa pasar bebas, antara lain adalah CAFTA (China ASEAN Free Trade Assosiation) atau ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement), AIFTA (ASEAN India Free Trade Assosiation) dan AEC (ASEAN Economic Community). Pada akhir tahun 2015, dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2015 bagi negara-negara ASEAN. Dengan pencapaian tersebut, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Konsekuensinya kita bersaing dengan produk barang dan jasa dari negara-negara ASEAN di negara kita sendiri maupun di pasar negara-negara ASEAN. Hal yang memberikan nilai tambah terhadap suatu nilai produk adalah daya saing (competitiveness).

Kondisi daya saing dan inovasi Indonesia yang masih belum baik tentunya merupakan cerminan dari kondisi pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari program-program yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih baru bertumpu kepada pengembangan sumber daya alam dan belum berdasarkan kreatifitas dan inovasi serta hanya berpendekatan supply-side strategy yang tidak dibarengi dengan demand-side strategy. Selain itu

pelaksanaan program-program oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya (donor, dunia usaha dan LSM) juga masih belum berjalan secara terpadu sehingga belum dapat mendorong daya saing baik daya saing produk maupun daya saing daerah. Kondisi ini menjadi ironis mengingat PEL sesungguhnya merupakan strategi pengembangan kapasitas dan potensi daerah berbasis pengetahuan dan sumber daya lokal dengan memperhatikan aspek pasar.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Tujuan dari pelaksanaan PEL adalah bahwa nantinya daerah memiliki perencanaan strategi dan agenda program PEL yang sinergi dan terintegrasi ke dalam kebijakan serta strategi daerah dan RPJMD. Tujuan akhir dari Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta ke depan dapat mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif serta menekankan pada keterkaitan dan sinergi pembangunan yang ada dalam suatu wilayah tertentu. PEL menyediakan ruang dan membuka kesempatan kepada seluruh komponen dalam suatu komunitas baik pemerintah, akademisi, swasta, organisasi non profit dan masyarakat untuk bekerja sama memperbaiki perekonomian lokal. Jadi pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan pendekatan yang terintegrasi/terpadu yang terdiri dari:

1. Perencanaan (strategi dan program) Pengembangan Ekonomi Lokal yang terintegrasi ke dalam kebijakan dan strategi Pembangunan daerah yang lebih luas,
2. Keterpaduan dalam stakeholder-multi stakeholder,
3. Keterpaduan dalam sektor-multi sektor.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan tidak hanya mampu memecahkan permasalahan ekonomi, tetapi juga aspek pembangunan lainnya yaitu peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan pada komunitas lokal dalam bentuk pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun rancangan awal strategi dan program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PEL dalam jangka menengah.

Kerangka Road Map Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Provinsi Jawa Tengah telah menjelaskan mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah. Proses PEL merupakan proses multistakeholder; melibatkan berbagai pihak. Tindak lanjut paling utama yang harus dilakukan adalah membangun komitmen dari seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya adalah kepala daerah, dunia usaha dan organisasi masyarakat madani. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dapat direalisasikan melalui penyusunan rencana aksi dan penganggaran setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan. Tahapan Pengembangan Ekonomi Lokal dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan forum stakeholder PEL;

Pembentukan serta penguatan forum stakeholder PEL dilaksanakan dalam rangka menjaga kepentingan dan keterlibatan para stakeholders ke dalam sebuah wadah organisasi; dapat berupa forum, perkumpulan, asosiasi, maupun hal lainnya. Organisasi perkumpulan tersebut berguna sebagai forum untuk berdialog, merencanakan, mengembangkan strategi serta melakukan pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan PEL di suatu wilayah. Anggota organisasi/forum stakeholder PEL dapat berasal dari instansi pemerintah, asosiasi pelaku usaha, perwakilan kelompok usaha masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan

LSM, perwakilan perguruan tinggi, hingga perorangan. Forum stakeholder PEL ini berfungsi untuk mendorong kemapanan organisasi atau basis kolektif, meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani serta menyiapkan wadah bagi para produsen untuk terlibat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.

1. Kajian tentang komoditas unggulan dan kawasan;

Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan analisis data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia usaha. Analisis data meliputi analisis rantai nilai (value chain analysis) dan analisis pengembangan wilayah serta analisis RALED. Untuk menentukan komoditi unggulan dapat digunakan Analisis Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative Advantage (RCA). Sedangkan untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Setelah diketahui komoditi unggulan (bisa 1 sampai 3 komoditi unggulan prioritas), kemudian dilakukan rembuk dari forum stakeholder yang sudah dibentuk, untuk menentukan komoditi unggulan daerah.

Analisis RALED digunakan untuk menentukan status PEL pada suatu daerah dan atribut pengungkit (leverage attribute) yang nantinya dijadikan untuk menyusun Rencana Induk (Master Plan). Sedangkan Analisis Pengembangan Wilayah, khususnya dari segi keruangan dapat menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG).

2. Penyusunan rencana aksi dan rencana anggaran;

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rencana PEL (Klaster) industri kreatif dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA, Analisis RALED dan analisis pengembangan wilayah. Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk PEL di aras kabupaten/kota, (2)

Rencana Bisnis dan (3) Rencana Aksi, berdasarkan hasil analisis tersebut dan telah memperhatikan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD.

Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif. Hal yang paling penting dalam penyusunan rencana induk ini adalah bahwa rencana induk (sebaiknya dilegalkan dalam bentuk Perbup/Perwali, dan sangat baik dalam bentuk Perda) nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran oleh seluruh SKPD, sehingga rencana induk ini sebaiknya dapat dintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra dan APBD). Khusus untuk penyusunan rencana anggaran dalam rencana aksi PEL di tingkat kota ini seyogyanya menggunakan program financial matrix. Program financial matrix tersebut memuat program dan kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani.

3. Implementasi LED

Pelaksanaan PEL pada prinsipnya selain memperkuat forum PEL juga membangun klaster bisnis yang dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, donor agency maupun organisasi masyarakat madani (akademisi, dll). Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu Klaster diharapkan dapat menghilangkan kendala-kendala dan inefisiensi untuk meningkatkan produktivitas. Koordinasi pelaksanaan sebaiknya dilakukan oleh Forum Stakeholder atau pengelola klaster agar terjadi keterpaduan dan keharmonisan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi berjalan sesuai dengan koridor dan arah perencanaan yang telah disusun. Monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan dan faktor pendorong apa yang melatarbelakangi kegagalan maupun kesuksesan dalam menjalankan sebuah program. Evaluasi bertujuan untuk menentukan kembali bagian dari rencana aksi yang masih diperlukan ataupun perlu dilakukan sebuah modifikasi.

Tahapan diatas oleh Pemerintah Kota Surakarta telah dilaksanakan hingga tahapan ketiga, yaitu penyusunan rencana aksi yang bersifat makro. Pada tahapan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah mengidentifikasi permasalahan strategis yang diperkirakan akan terjadi dalam kurung waktu 5 tahun ke depan, dilihat dari permasalahan menurut RPJMD dan Analisis RALED. Dalam dokumen Rencana Aksi PEL juga dijelaskan mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta serta arah kebijakan yang nantinya harus diimplementasikan dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi lokal di Kota Surakarta.

Pada tahapan selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta perlu untuk menyusun rencana aksi detail untuk masing-masing sektor unggulan serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengawal pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan tidak hanya mampu memecahkan permasalahan ekonomi, tetapi juga aspek pembangunan lainnya yaitu peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan pada komunitas lokal dalam bentuk pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun rancangan awal strategi dan program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PEL dalam jangka menengah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Forum for Economic Development and Employment Promotion.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aks Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2017 adalah memberikan acuan/arahan/pedoman kepada pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat luas dalam rangka melaksanakan pengembangan ekonomi lokal (PEL) di Kota Surakarta.

Tujuan dari Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aks Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta
2. Mengidentifikasi strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat dan sesuai dengan tujuan PEL dan sejalan dengan RPJMD.
3. Mengidentifikasi agenda program dan kegiatan yang mampu mendorong tercapainya tujuan PEL.

D. Keluaran

Keluaran/ouput dokumen Rencana Aksi Tahunan serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2017 dalam bentuk:

1. Laporan Akhir sebanyak 10 buku
2. Laporan Akhir masing – masing sebanyak 10 buku
3. Soft Copy / flash disk sebanyak 5 buah.

E. Ruang Lingkup

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aks Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Analisa tentang kondisi historis dan proyeksi indikator-indikator perekonomian masyarakat Kota Surakarta
2. Analisa mengenai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta
3. Analisa faktor internal dan eksternal terkait daya saing Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta
4. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta dalam jangka waktu 5 tahun (2016 – 2021)

F. Sistematika Laporan Akhir

Sistematikan Penulisan yang digunakan dalam laporan akhir penyusunan Rencana Aks Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, output, ruang lingkup dan sistematika Laporan Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum Wilayah berisi gambaran geografis, gambaran demografis dan gambaran dari aspek perekonomian Kota Salatiga meliputi PDRB, PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

- BAB III Metode pelaksanaan pekerjaan, yang berisi kajian teoritis, kerangka pikir, rincian variabel dan tahapan penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta.
- BAB IV Analisis SOAR Sentra Industri Kecil dan Menengah, berisi tentang kondisi pembangunan Sentra Industri Kota Surakarta.
- BAB V Rencan Aksi Tahunan PEL, berisi tentang telaah RPJMD dalam pengembangan PEL, Identifkasi Program dan Kegiatan Renstra OPD yang Mendukung terhadap PEL, dan Rencana Bisnis Pengembangan Klaster Usaha
- Bab VI Monitoring dan Evaluasi, berisi tentang Konsep Monitoring dan Evaluasi, serta format monev Rencana Aksi Tahunan PEL.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Administrasi Wilayah

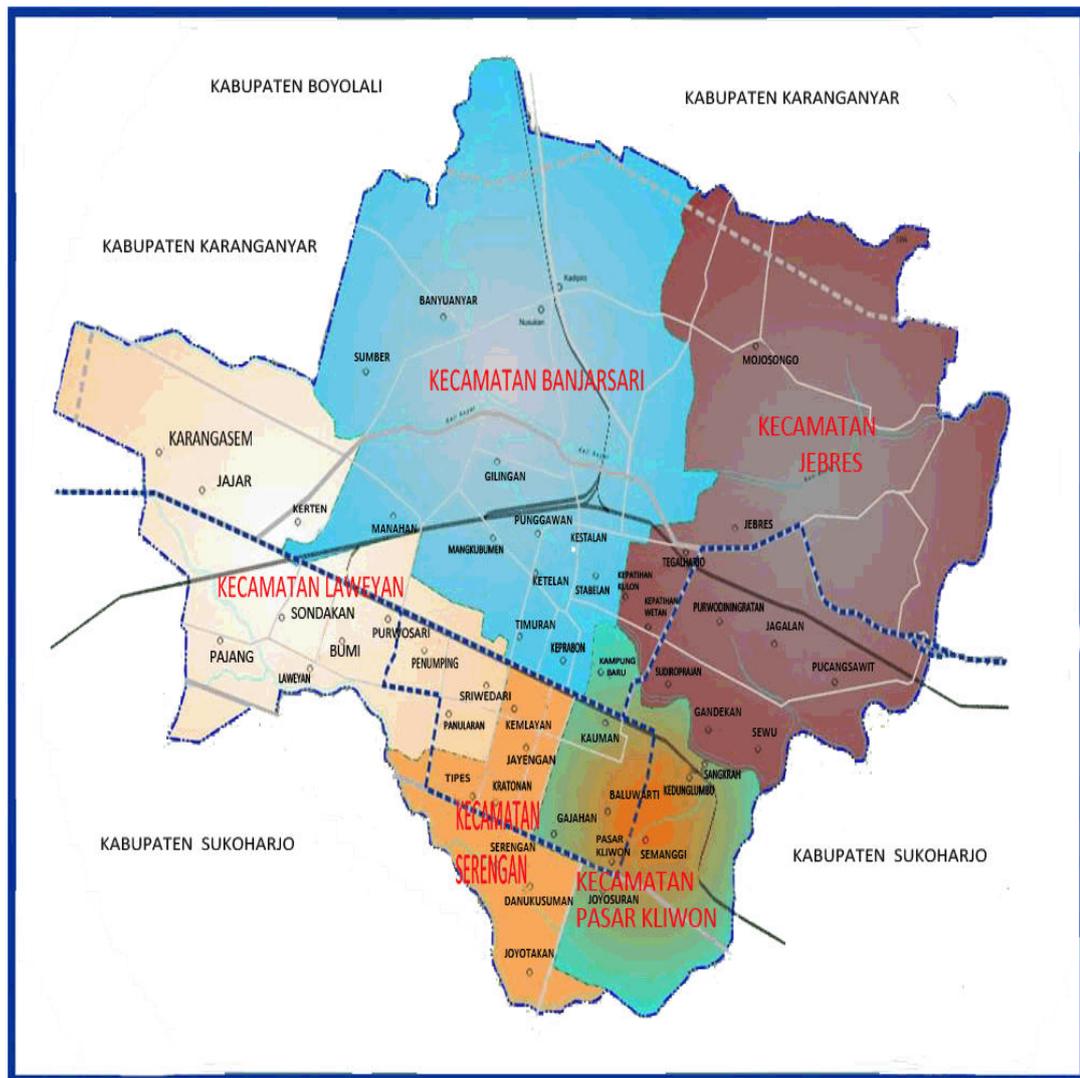
Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 Km² terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan.

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta 2007-2026 adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali

Tabel 2.1.
Pembagian wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah	RW	RT
		(Km ²)		
Laweyan	11	8,64	105	457
Serengan	7	3,19	72	312
Pasar Kliwon	9	4,82	100	422
Jebres	11	12,58	151	646
Banjarsari	13	15,81	176	877
Kota Surakarta	51	44,06	604	2.714



Grafik 2.1 Peta Kota Surakarta

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta, 2016

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut.

Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kota Surakarta termasuk kawasan dataran rendah. Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter dari

permukaan laut, sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta rata-rata memiliki suhu udara antara 25,8°C sampai dengan 28,9°C pada tahun 2015. Adapun kelembaban udaranya antara 65% sampai dengan 88%. Jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Januari yaitu 27 hari dengan curah hujan sebesar 306,00 mm.

Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, luasnya mencapai kurang lebih 66% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terbagi atas pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau (RTH); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan yang termasuk dalam kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukkan industri; kawasan peruntukkan pariwisata; peruntukkan permukiman; kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukkan perkantoran; kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); kawasan peruntukkan kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukkan lain (pertanian; perikanan; pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan pertahanan dan keamanan).

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi sempadan sungai dan mengendalikan perkembangannya, mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap, dan merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Kawasan perlindungan setempat di Kota Surakarta meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung. Adapun luas kawasan

perlindungan setempat mencapai 401 Ha yang tersebar di 5 wilayah kawasan.

Penyediaan RTH di Kota Surakarta berdasarkan RTRW yang telah disusun luasnya mencapai 882,04 Ha atau sekitar 20,03% dari luas kota. RTH yang ada meliputi RTH taman kota/alun-alun/monumen; RTH taman pemakaman; RTH penyangga air (resapan air); RTH jalur jalan kota; RTH sempadan sungai; RTH sempadan rel; RTH pada tanah negara; dan RTH kebun binatang.

Kawasan cagar budaya terbagi dalam dua kategori, yaitu ruang terbuka/taman, dan kawasan bangunan cagar budaya lainnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kelompok bangunan, meliputi bangunan rumah tradisional, bangunan umum kolonial, bangunan peribadatan, gapura, tugu, monumen, dan perabot jalan. Luas kawasan ini sebesar 81 Ha. Adapun pengembangan kawasan cagar budaya ini melalui pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan.

Kota Surakarta dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang hampir setiap musim penghujan selalu meluap. Hal tersebut mengakibatkan beberapa wilayah di Kota Surakarta adalah daerah yang rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana banjir di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Jebres di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Jebres, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pucang Sawit, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Sewu, dan Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Pasarkliwon di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Pasarkliwon, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi, dan Kecamatan Serengan di Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Kratonan, Kelurahan

Serengan, dan Kelurahan Tipes. Sedangkan rencana pengelolaan kawasan banjir melalui normalisasi Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dan Kali Tanggul; penguatan tanggul sungai di sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Wingko, Kali Anyar, Kali Gajah Putih; pemeliharaan kolam retensi; dan revitalisasi drainase perkotaan.

Pengembangan kawasan budidaya yang pertama adalah kawasan peruntukkan industri. Kawasan industri rumah tangga dan kawasan industri kreatif. Kawasan industri rumah tangga meliputi: industri rumah tangga mebel di Kecamatan Jebres; industri rumah tangga pembuatan shuttlecock dan gitar di Kecamatan Pasarkliwon; industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Sementara itu kawasan industri kreatif meliputi industri batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan.

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh.

Pengembangan kawasan untuk permukiman seluas 2.275 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah kota. Pengembangannya melalui

perumahan vertikal berupa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan.

Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pasar tradisional berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasarkliwon. Pusat perbelanjaan meliputi pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol. Sedangkan toko modern berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Kawasan peruntukkan perkantoran di wilayah Kota Surakarta seluas 19 Ha, meliputi: (1) Kawasan I seluas 1 (satu) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan; (2) Kawasan II seluas 6 (enam) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari seluas 5 (lima) ha dan Kecamatan Laweyan seluas 1 (satu) ha; (3) Kawasan V seluas 4 (empat) ha yaitu di Kecamatan Jebres; dan (4) Kawasan VI seluas 8 (delapan) ha yaitu di Kecamatan Pasarkliwon.

Kawasan RTNH seluas 7 (tujuh) ha tersebar di seluruh wilayah kota, yang meliputi RTNH di kawasan I seluas 3 (tiga) ha, terletak di Kecamatan Jebres seluas 1 (satu) ha dan Kecamatan Pasarkliwon seluas 2 (dua) Ha, RTNH di kawasan III seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari, dan RTNH di kawasan V seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Jebres.

Kawasan peruntukkan kegiatan sektor informal meliputi: (1) ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh Pemerintah Daerah; (2) ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR), (3) ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (night market), di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto. Sebaran ruang bagi kegiatan sektor informal, antara lain adalah di Kawasan I yaitu di Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Keratonan dan Kelurahan Sriwedari-Kecamatan Pasarkliwon, Kawasan II yaitu di Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan; Kawasan V yaitu di Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan- Kecamatan Jebres, Kawasan VI yaitu di Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan-Kecamatan Banjarsari.

Kawasan peruntukkan lain pertanian seluas sekitar 111 Ha yang terletak di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres, terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan perikanan budidaya dialokasikan di perairan umum darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari. Kawasan peruntukkan lain pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan dikembangkan di seluruh wilayah kota. Kawasan peruntukkan lain pertahanan dan keamanan juga dikembangkan di seluruh wilayah kota.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2015 berdasarkan data Dispendukcapil berjumlah 557.606 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 275.266 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 282.340 jiwa. Dengan porsi tersebut maka sex rasio penduduk di Kota Surakarta adalah 97,49 atau dapat diartikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki.

Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Pada tahun 2015 sebesar 12.661 Jiwa/Km², meningkat jumlah kepadatan penduduk tahun sebelumnya 2014 jumlah kepadatan penduduk sebesar 11.585 jiwa/km². Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kota Surakarta sudah melaksanakan e-KTP sejak tahun 2011, sehingga penduduk lebih tertib administrasinya dan penduduk yang hendak menguruskan akta kelahiran baru juga harus memasukkan anak ke Kartu Keluarga sehingga anak tersebut langsung tercatat di Dinas. Secara rinci pertumbuhan penduduk kota Surakarta dari tahun 2011-2015 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2011– 2015

No	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk	505.413	507.825	552.650	557.606	513.686
2.	Laki-laki	245.805	246.982	273.038	275.266	249.775
3.	Perempuan	259.608	260.843	279.612	282.340	263.911
4.	Laju Pertumbuhan	0,50	0,47	0,44	0,32	n/a
5.	Rasio Jenis kelamin	96,59	97,15	97,65	94,69	n/a
6.	KepadatanPenduduk(jiwa/km2)	11.479	11.534	12.549	12.661	n/a

Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta, April 2016

Persebaran penduduk di Kota Surakarta tidak merata. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah

Kecamatan Banjarsari. Pada tahun 2015 jumlah penduduk kecamatan Banjarsari sebesar 175.648 jiwa, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Serengan. Jumlah penduduk Kecamatan Serengan sebesar 53.974 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan di Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan
Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Laweyan	86.666	87.104	87.520	97.990	101.291
2	Serengan	43.962	44.185	44.396	53.135	53.974
3	Pasar Kliwon	74.792	75.171	75.529	84.010	84.517
4	Jebres	139.026	139.730	140.398	142.136	142.176
5	Banjarsari	158.420	159.223	159.982	175.379	175.648
	Kota Surakarta	502.866	505.413	507.825	552.650	557.606

*Sumber: BPS 2015 dan *) Dispendukcapil Kota Surakarta, April 2016*

Berdasarkan kelompok umur, penduduk tahun 2015 yang paling banyak terdapat pada umur 30-34 yaitu sebesar 47.052, dengan jumlah laki-laki sebanyak 23.555 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 23.497 jiwa . Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok Manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan Manula laki-laki. Secara rinci penduduk kota Surakarta menurut kelompok umur tahun 2014-2015 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur
Tahun 2014-2015

Usia (th)	2014			2015			2016		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
0-4	19.342	18.555	37.897	18.921	18.377	37.298	15.986	16.785	32.773
5 - 9	21.569	20.207	41.776	22.283	20.881	43.164	20.856	18.368	39.246
10 - 14	21.748	20.937	42.685	21.970	21.184	43.154	19.333	22.960	42.328
15 - 19	21.294	20.487	41.781	21.810	21.338	43.148	21.231	19.081	40.324
20 - 24	20.599	20.189	40.788	21.244	20.460	41.704	27.400	29.584	57.019
25 - 29	20.567	20.426	40.993	19.948	19.825	39.773	18.683	16.204	34.879
30 - 34	24.295	24.214	48.509	23.555	23.497	47.052	16.485	17.893	34.366
35 - 39	23.015	22.950	45.965	23.505	23.441	46.946	20.806	20.981	41.814
40 - 44	20.613	21.384	41.997	20.917	21.460	42.377	13.538	16.415	29.948
45 - 49	19.758	21.236	40.994	19.814	21.061	40.875	21.006	22.037	43.047
50 - 54	17.060	19.060	36.120	17.290	19.445	36.735	16.360	18.870	35.239
55 - 59	14.842	16.055	30.897	15.381	16.717	32.098	14.012	14.779	28.766
60 - 64	11.404	11.421	22.825	11.700	12.028	23.728	9.541	11.427	21.010
65-69	6.336	7.448	13.784	6.715	7.721	14.436	5.745	5.463	11.198
70-74	4.623	6.153	10.776	4.357	5.875	10.232	4.271	5.173	9.452
75+	5.973	8.890	14.863	5.856	9.030	14.886	4.521	7.891	12.277
Jumlah	273.038	279.612	552.650	275.266	282.340	557.606	249.774	263.911	513.686

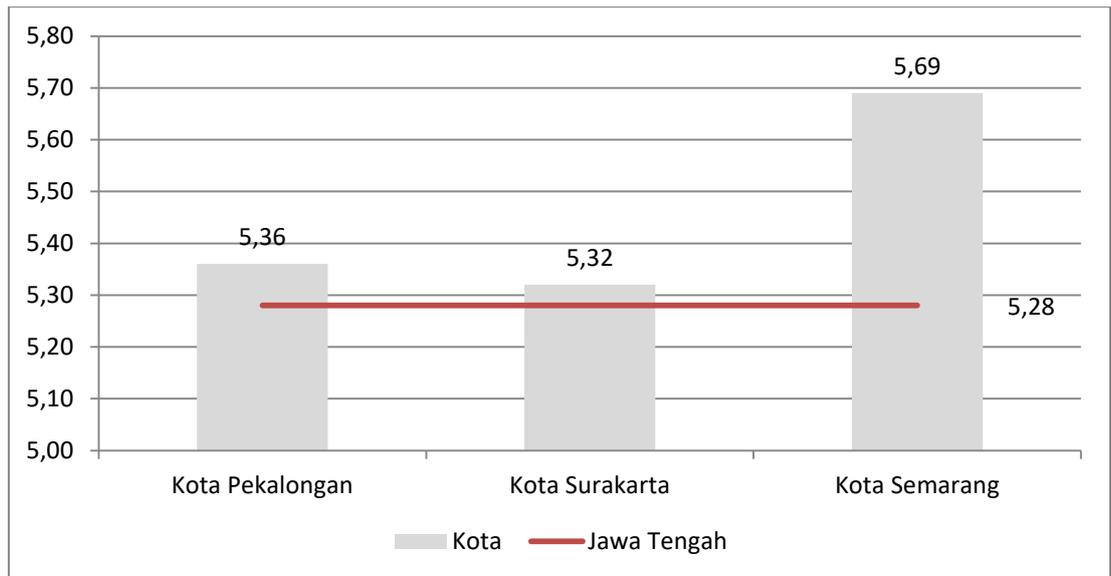
Sumber: BPS, Buku Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah 2016,2017

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 5,32%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 3 kota lain di sekitar, Kota Surakarta berada di posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (5,69). Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2016 lebih tinggi dan provinsi Jawa Tengah (5,28), seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Sumber : BPS Kota Surakarta 2016

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Kota di sekitarnya Tahun 2016

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta, masih didominasi dan digerakkan oleh sektor sekunder dan tersier, dimana nilai investasi yang berkontribusi terhadap nilai PDB, masih digerakkan oleh daya tarik pasar domestik, khususnya di sektor konstruksi, seiring dengan keberhasilan city branding Kota Surakarta sebagai Kota MICE melalui pertumbuhan hotel, perdagangan dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan, konsumsi di Kota Surakarta tumbuh stabil antara lain didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat.

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Kontribusi per sektoral atau kategori pada PDRB dari tahun 2012 sampai 2016 masih didominasi oleh sektor/kategori konstruksi, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran, dan sektor/kategori komunikasi dan informasi. Pada tahun 2012, sektor/kategori konstruksi menyumbang sebesar 26,99%, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar 23,34% dan berikutnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,43%. Meskipun merupakan sektor/kategori dominan selama lima tahun, namun kontribusi tiga sektor/kategori tersebut menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2016, kontribusi sektor/kategori konstruksi menyumbang 26,97%, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 22,49%, dan sektor/kategori komunikasi dan informasi sebesar 10,43%.

Sektor/kategori yang meningkat kontribusinya adalah sektor/kategori jasa keuangan dan asuransi serta sektor/kategori penyediaan akomodasi, makan dan minum. Selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Kontribusi sektor/kategori jasa keuangan dan asuransi meningkat dari 3,71% pada tahun 2012 menjadi 3,93% pada tahun 2016. Sektor/Kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan perkembangan meningkat sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 menyumbang 5,36% meningkat menjadi 5,93% pada tahun 2016.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,52% adalah capaian di tengah tekanan perubahan alih fungsi lahan.

Perkembangan PDRB perkapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

KATEGORI	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,54	0,52	0,52	0,49
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,51	0,54	0,52	0,52	0,49
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0	0	0	0	0
	3. Perikanan	0	0	0	0	0
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	8,27	8,39	8,7	8,58	8,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,2	0,19	0,17	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	26,99	26,5	26,8	26,9	26,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,34	23,52	22,79	22,56	22,49
H	Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,45	2,58	2,67	2,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36	5,55	5,7	5,76	5,93
J	Informasi dan Komunikasi	11,23	11,01	10,77	10,62	10,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,67	3,66	3,79	3,93
L	Real Estate	4,09	3,95	4,04	4,11	4,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,72	0,73	0,78	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	6,1	5,89	5,96	5,95
P	Jasa Pendidikan	4,87	5,28	5,41	5,37	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,02	1,08	1,1	1,1
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,95	0,94	0,95	0,93	0,95

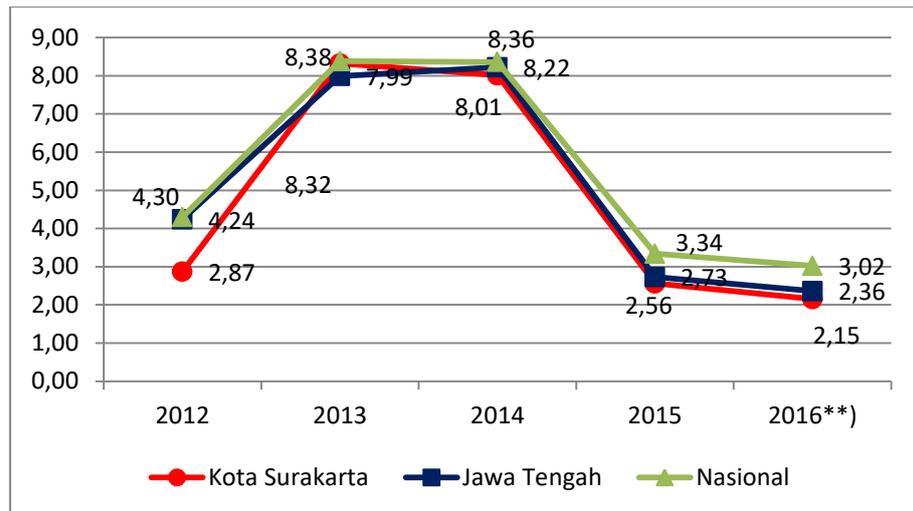
Sumber : BPS Kota Surakarta, April 2016

Tahun 2016 PDRB ADHK Per Kapita Kota Surakarta mencapai 29.965.873,01 juta rupiah Rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 28.453.493,87 juta rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Sedangkan PDRB ADHB tahun 2016 sebesar 37.793.266,18 juta Rupiah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir adalah 5,32 %.

Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi pada kategori/sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,34%, Jasa keuangan dan Asuransi 8,32% dan disusul Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,28%. Untuk sektor primer, pertumbuhan rata-ratanya di bawah 2 %. Hal ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Kota Surakarta.

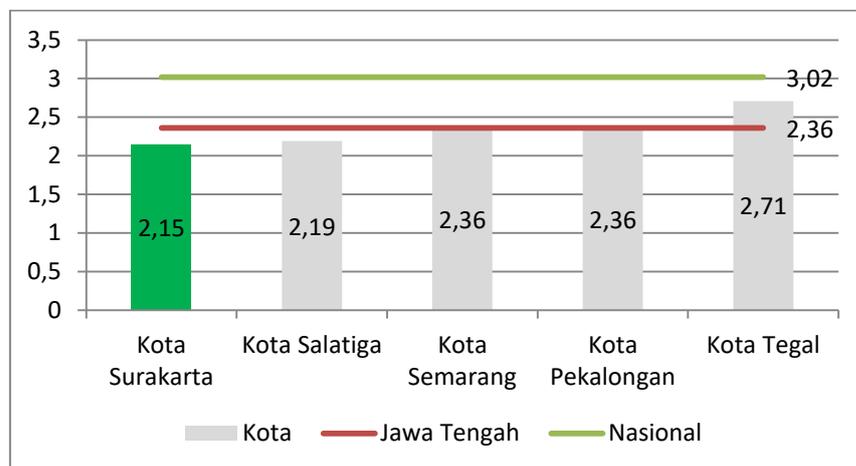
c. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kota Surakarta tahun 2016 sebesar 2,15% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,56%. Kondisi inflasi Kota Surakarta tahun 2014 penurunannya tidak signifikan dari tahun 2013 sebesar 8,32%. Secara rinci laju inflasi di Kota Surakarta tahun 2012-2016 bisa dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016
Grafik 2.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2012-2016

Dibandingkan dengan capaian inflasi Provinsi Jawa tengah sebesar 2,36% dan Nasional sebesar 3,02% pada tahun 2016, inflasi Kota Surakarta sebesar 2,15% berada lebih rendah. Sedangkan dibandingkan 5 (lima) kota lainnya inflasi Kota Surakarta berada pada posisi terendah seperti pada gambar dibawah ini



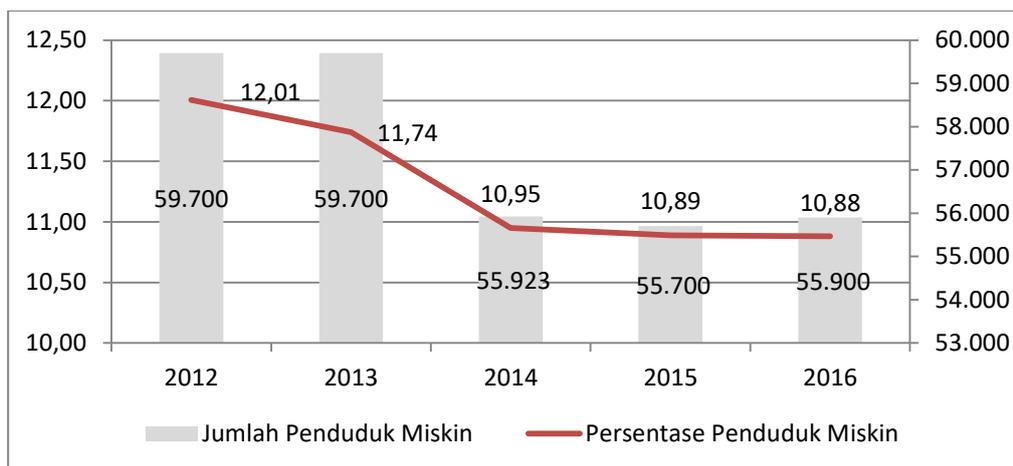
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016
Grafik 2.4 Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dengan Kota/kab Lain Di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016

d. Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2012 garis kemiskinan besarnya 361.517 rupiah/kapita/bulan mengalami penurunan tahun 2016 yang besarnya Rp. 430.293 kapita/bulan.

Kondisi umum kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

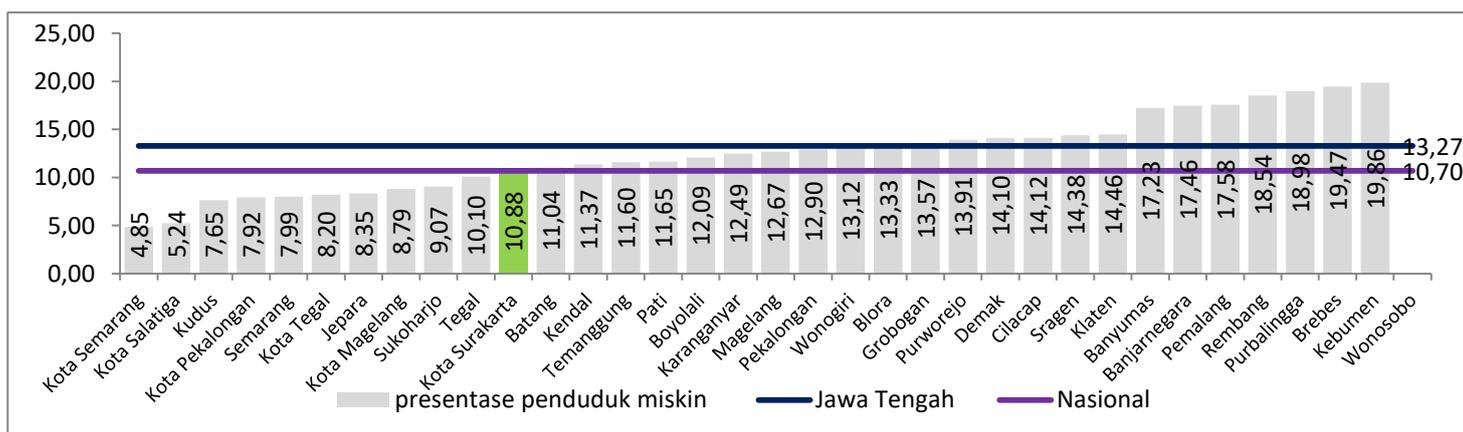
Dalam kurun waktu 2012 – 2016, perkembangan tingkat kemiskinan Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan. Tahun 2016, tingkat kemiskinan Kota Suakarta sebesar 10,88% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan angka kemiskinan sebesar 12,01%. Penurunan tingkat kemiskinan searah dengan jumlah penduduk miskin yang menurun di Kota Surakarta. Tren positif tingkat kemiskinan Kota Surakarta ditunjukkan dari tahun 2012 – 2016 dengan tren menurun setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : BPS kota Surakarta, 2017

Grafik 2.5 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2012 - 2016

Tingkat kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2016 adalah sebesar 10,88 %. Capaian ini sudah cukup baik karena berada di bawah rata-rata capaian Nasional (13,27) akan tetapi masih di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,70%. Apabila dibandingkan dengan lima kota lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Magelang, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal, angka kemiskinan di Kota Surakarta masih tertinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

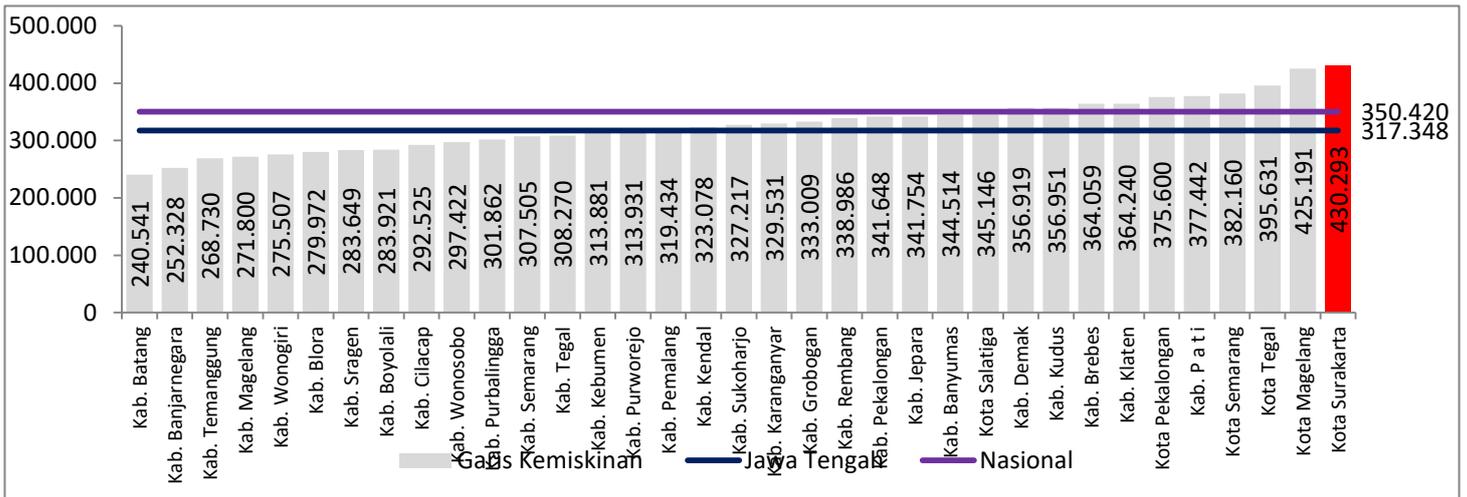


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2016

Grafik 2.6 Perbandingan presentase kemiskinan Kota Surakarta dengan Kabupaten/kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2016

Dilihat dari sisi efektifitasnya, capaian tingkat kemiskinan Kota Surakarta sudah terlihat efektif, meskipun penurunan capaian tidak terlalu besar. Hal ini bisa dilihat karena dalam tahun 2012 – 2016 angka kemiskinan di Kota Surakarta setiap tahunnya mengalami perbaikan. Hal ini mengindikasikan kinerja penurunan angka kemiskinan bekerja dengan baik. Dengan menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2014, ini menunjukkan adanya relevansi capaian dan kinerja angka kemiskinan di Kota Surakarta terhadap target capaian angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

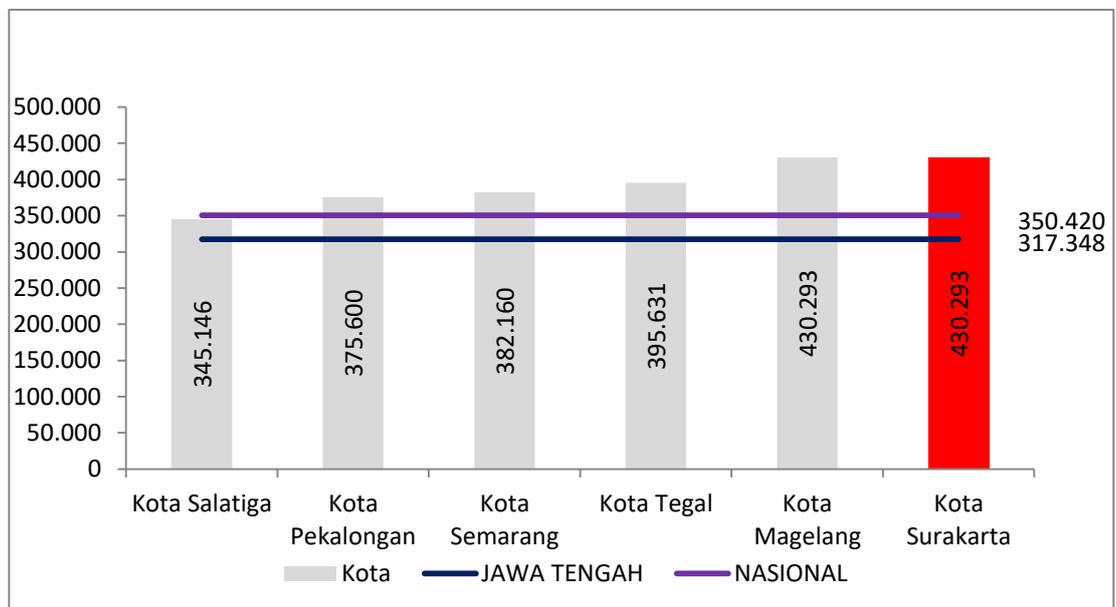
Garis kemiskinan terdiri atas garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kota Surakarta adalah sebesar Rp.430.293, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.317.248. Sementara itu apabila disandingkan dengan garis kemiskinan kota lainnya di Jawa Tengah, garis kemiskinan Kota Surakarta terlihat paling besar. Ini menunjukkan biaya hidup di Kota Surakarta lebih mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : BPS kota Surakarta ,2017

Grafik 2.7 Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kota Surakarta Tahun 2016

Sementara itu dilihat dari perkembangannya, garis kemiskinan di Kota Surakarta terlihat meningkat cukup signifikan dalam rentang waktu 2012-2016. Pada Tahun 2016 garis kemiskinan di Kota Surakarta sebesar Rp.430.293 Ada peningkatan selama kurun waktu tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui Grafik berikut ini.



Sumber : BPS kota Surakarta 2016

Grafik 2.8 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2016

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada periode Maret 2016, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,00% mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan September 2015 yang sebesar 73,23%. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

1) Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada Maret 2016 adalah beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2016

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Beras	31,32	Beras	34,64
2	Rokok kretek filter	12,24	Rokok kretek filter	9,59
3	Telur ayam ras	4,76	Telur ayam ras	4,51
4	Tempe	3,99	Tempe	4,28
5	Daging ayam ras	3,99	Gula pasir	3,94
6	Gula pasir	3,85	Bawang merah	3,60
7	Mie instan	3,66	Tahu	3,42
8	Tahu	3,30	Mie instan	3,37
9	Bawang merah	2,93	Daging ayam ras	3,01
10	Roti	2,61	Cabe rawit	2,49

Sumber: BPS, 2016

2) Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah biaya perumahan dan bensin, secara rinci ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7.
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2016

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	25,89	Perumahan	26,72
2	Bensin	11,07	Bensin	11,77
3	Pendidikan	9,89	Listrik	7,03
4	Listrik	9,34	Pendidikan	6,36

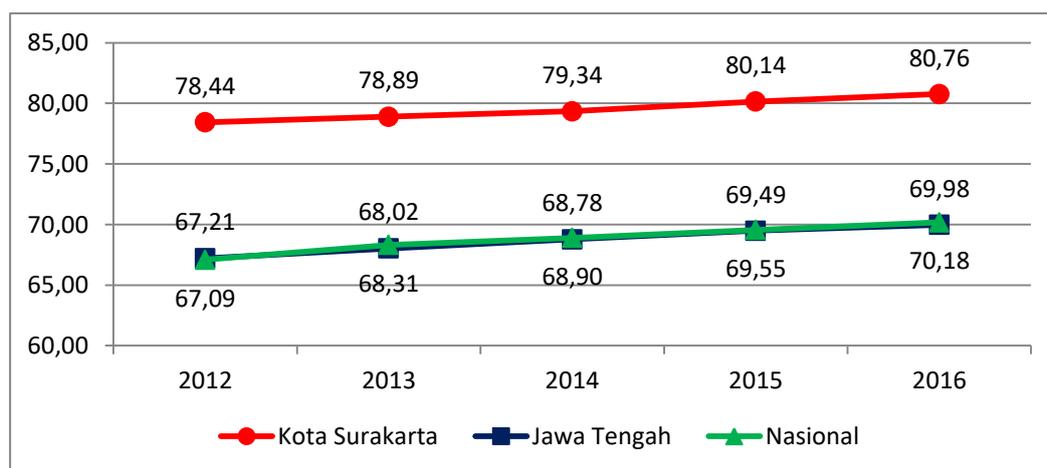
No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
5	Perlengkapan mandi	5,63	Kayu bakar	5,64

Sumber: BPS, 2016

2. Kondisi Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

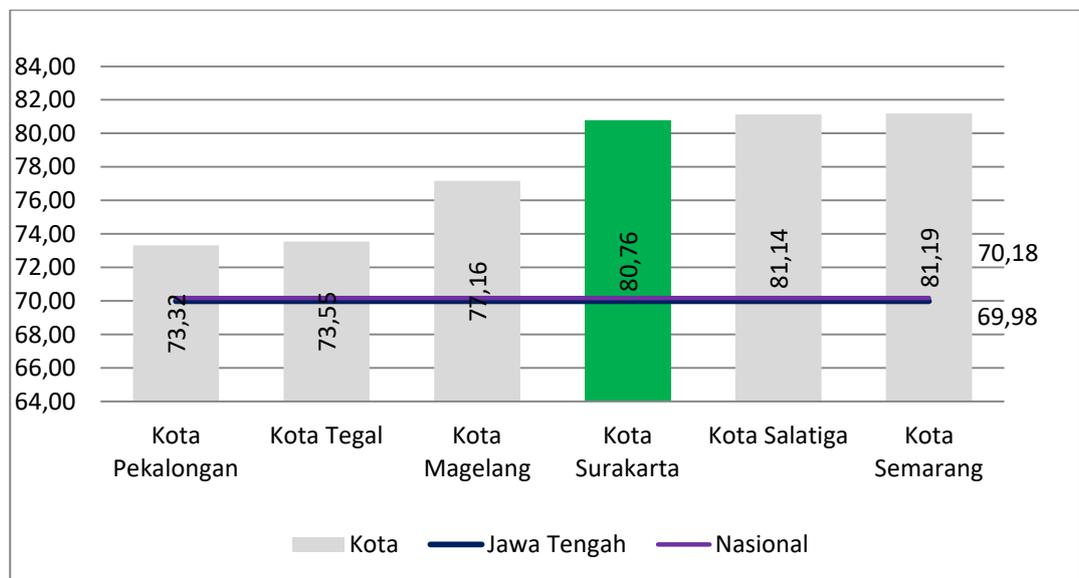
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2012 hingga 2016 IPM Kota Surakarta mengalami peningkatan tiap tahunnya. IPM Kota Surakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 78,44 meningkat menjadi 80,76 pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 80. Pada Tahun 2016 IPM Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang sangat baik di Provinsi Jawa Tengah dengan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 69,98 dan begitu pula dengan Nasional sebesar 70,18, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.9



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016

IPM Kota Surakarta dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah tahun 2016 pada Gambar 2.27, ditunjukkan pada kondisi terbaik ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kota Surakarta termasuk berkinerja baik. Perbandingan IPM Kota Surakarta pada tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.10.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

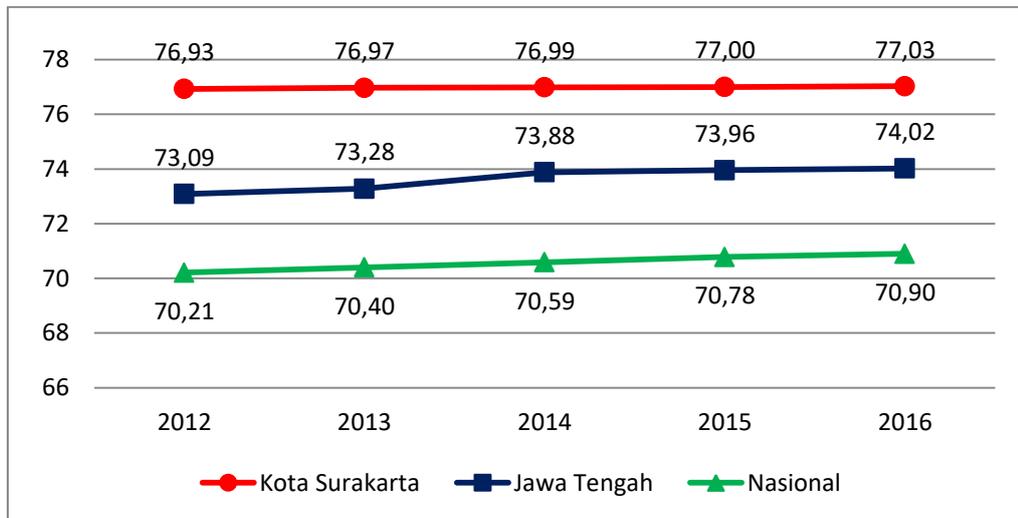
Grafik 2.10 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2016

IPM diukur menggunakan beberapa indikator pembentuk IPM, meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita dengan uraian di bawah ini:

1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 76,93 tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 77,03 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap

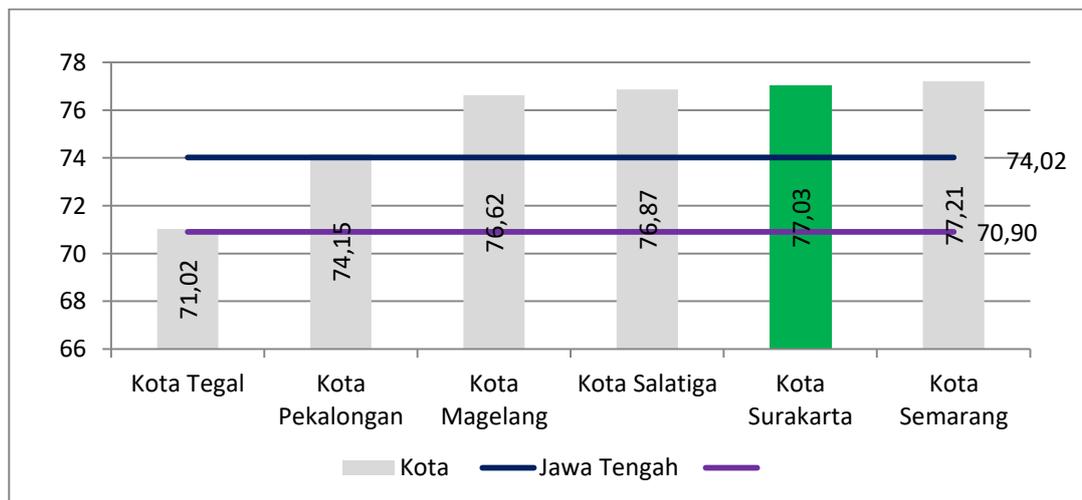
perkembangan angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.11.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.11 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2012-2016 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 77,03 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,02 tahun serta merupakan tertinggi kedua setelah Kota Semarang dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.12.



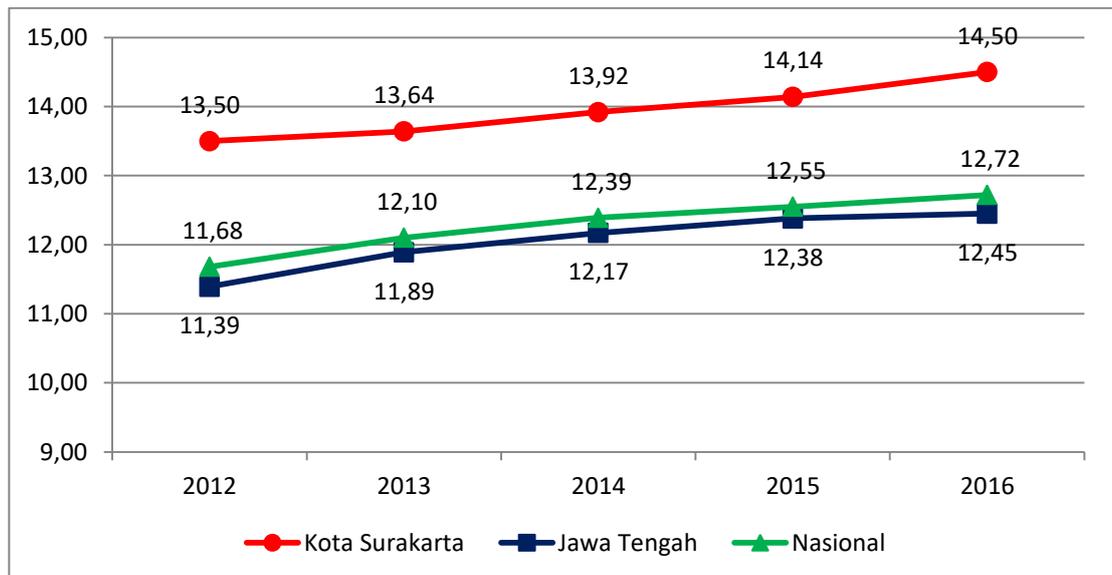
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.12 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Surakarta dan Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2016 (Tahun)

2) Harapan Lama Sekolah

Untuk angka harapan lama sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 13,50 tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 14,50 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.13.

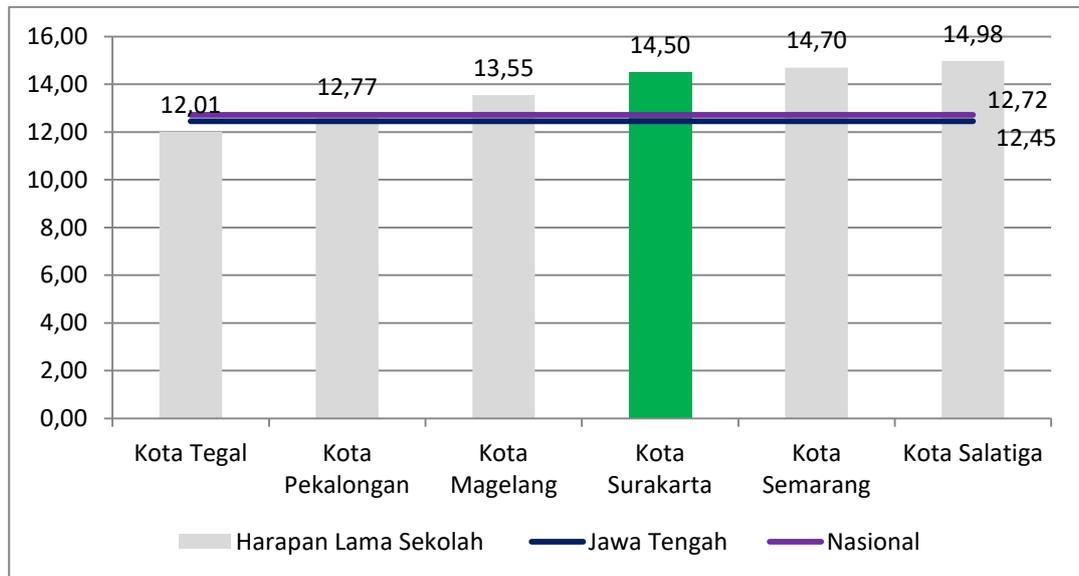


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.13 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2012-2016 (Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 14,50 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,45 tahun, namun masih rendah

dibandingkan Kota Salatiga dan Kota Semarang, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.14.

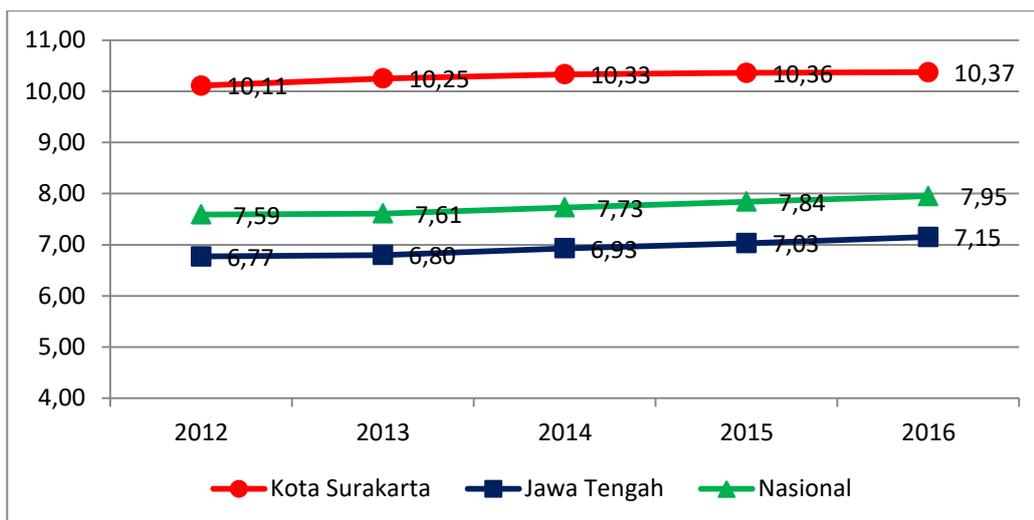


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.14 Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2016 (Tahun)

3) Rata-rata lama sekolah

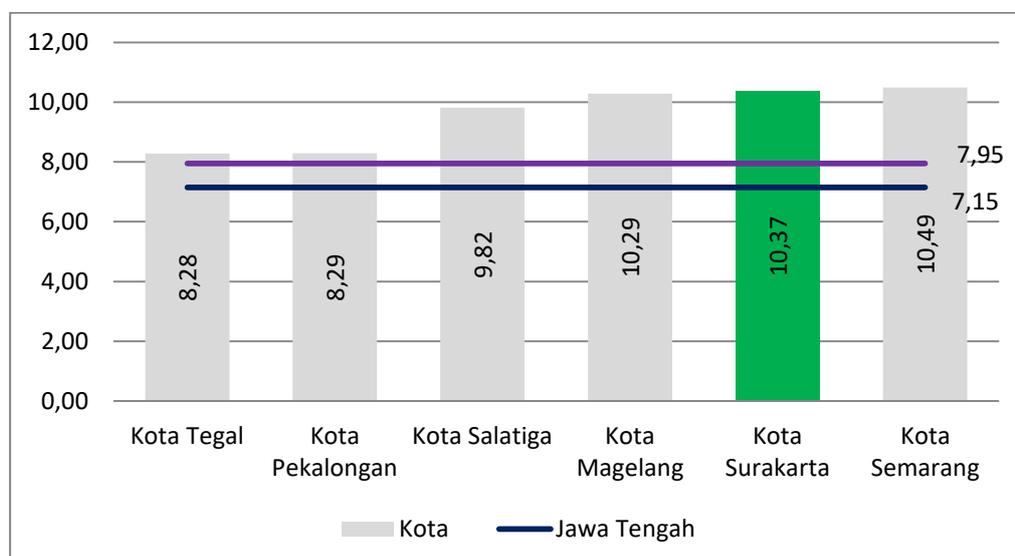
Pada rata-rata lama sekolah, di Kota Surakarta sudah mencapai 10,37 tahun pada tahun 2016. Rata-rata lama sekolah ini sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 10,11 tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 10,37 tahun. Kondisi ini relevan dan jauh lebih tinggi terhadap perkembangan rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.15.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2012-2016 (Tahun)

Sedangkan posisi relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 10,37 tahun merupakan tertinggi ke dua setelah Kota Semarang dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.16.

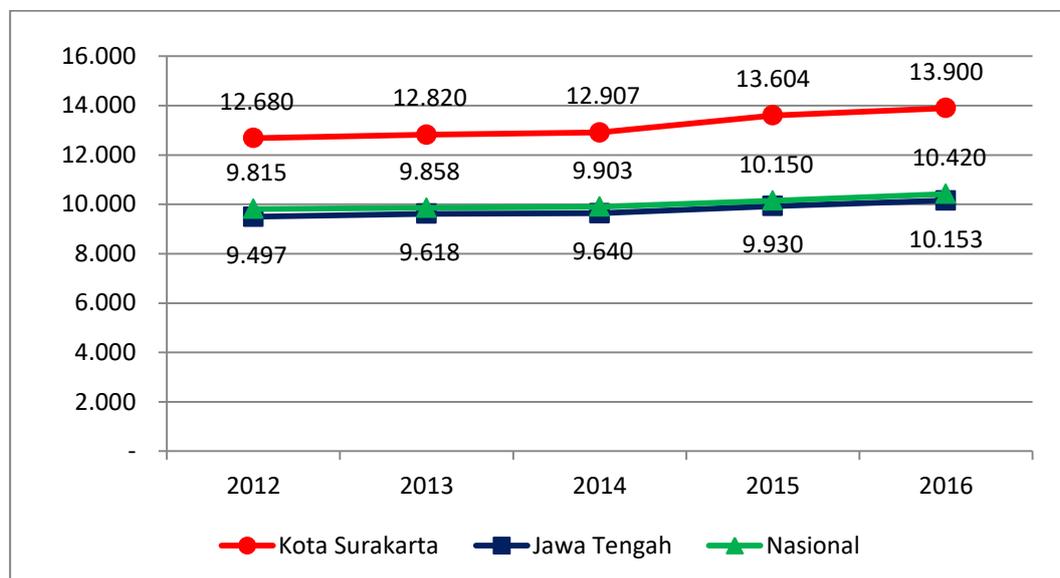


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.16 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2016 (Tahun)

4) Pengeluaran per Kapita

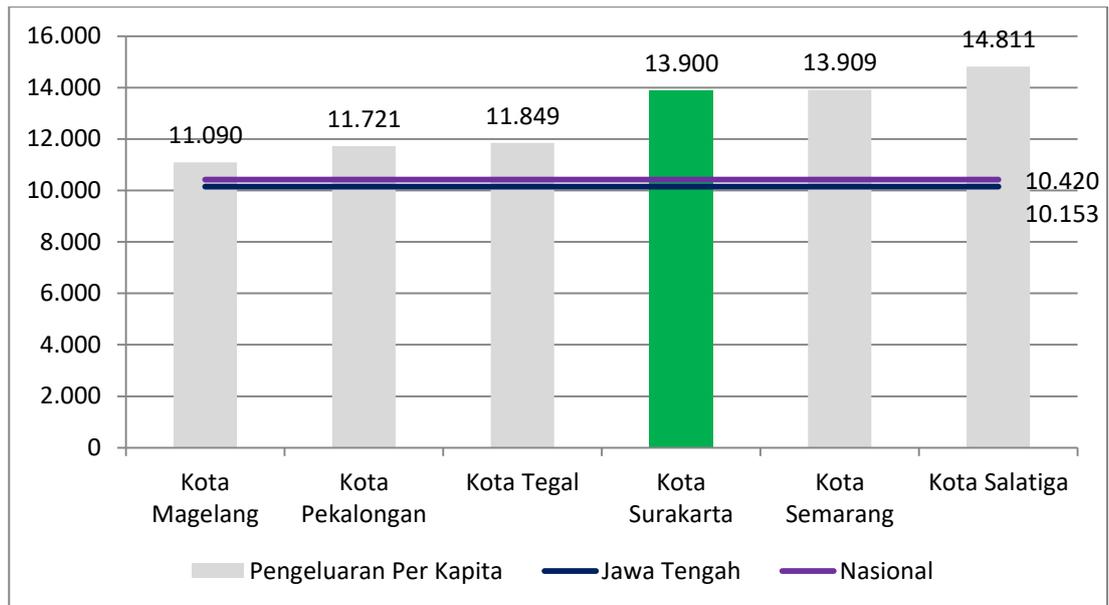
Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli masyarakat sebagai simbol kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 12.680 ribu dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 13.900 ribu. Kondisi ini relevan dan jauh lebih tinggi terhadap perkembangan rata-rata Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Grafik 2.34.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.17 Perkembangan Perngeluaran Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.900 ribu masih lebih rendah dibandingkan Kota Salatiga sebesar Rp.14.811 ribu dan Kota Semarang sebesar Rp.13.900, namun masih lebih tinggi dari 3 (tiga) kota lainnya di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.18.



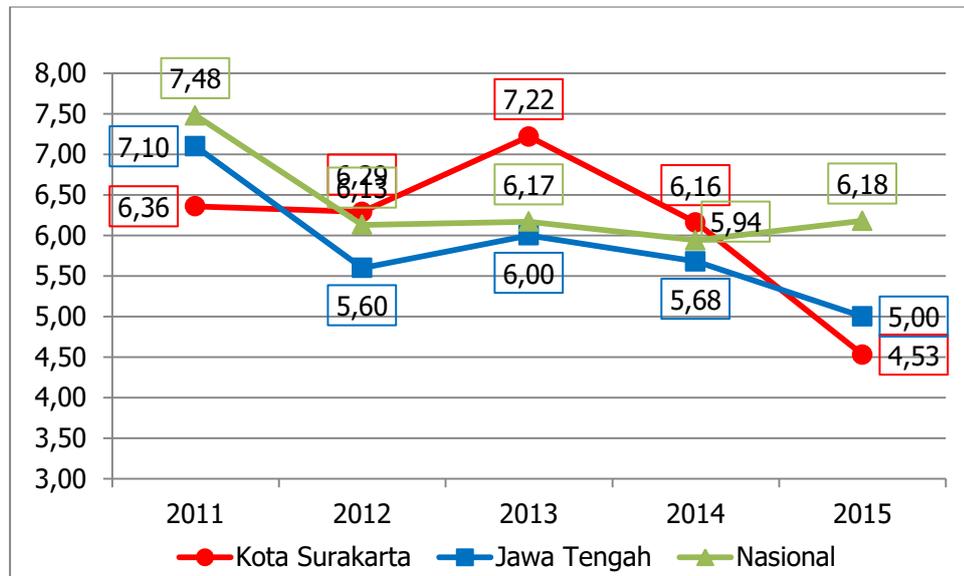
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 2.18 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2016 (Ribu Rupiah)

b. Tingkat pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

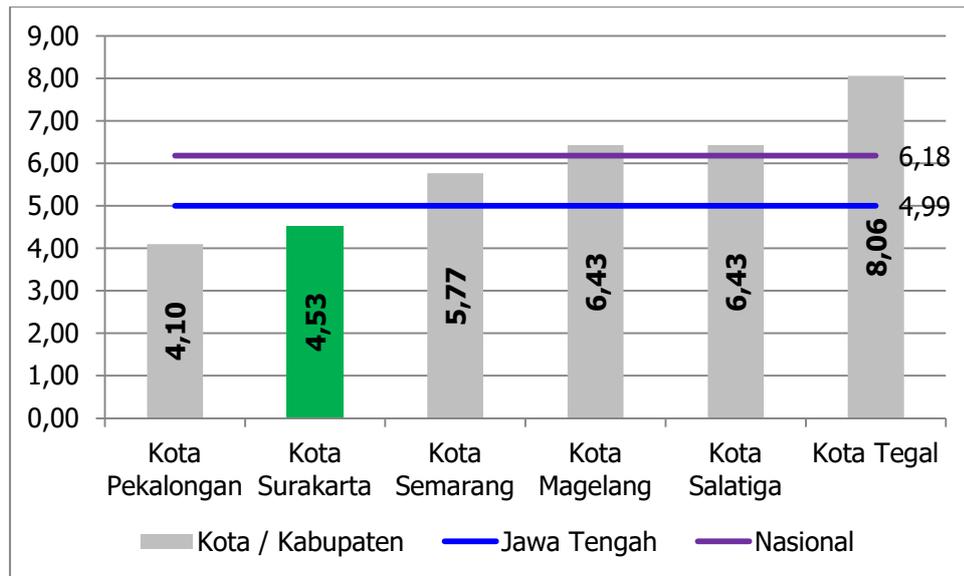
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan tahun (2011-2015), yaitu pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,53%, dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 sebesar 6,36%. Perkembangan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta ditunjukkan melalui Grafik 2.23.



Sumber : Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015, 2016

Grafik 2.19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,53%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,99%) dan Nasional (6,18%) serta terendah kedua diantara kota lainnya setelah Kota Pekalongan (4,20%). Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4-5 orang merupakan pengangguran.



Sumber: Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015, 2016

Grafik 2.20 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2015 (%)

Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonominya sebagian besar adalah pada sektor perdagangan, jasa dan industri menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama pada para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

BAB III

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari siklus pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Tahap ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PEL. Monev perlu dilakukan terutama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan PEL. Oleh karenanya, kegiatan monev dapat dilakukan dalam setiap tahap dan langkah dalam siklus PEL.

Pada tahap implementasi PEL, monev juga memiliki fungsi manajemen yang sangat penting. Data dari informasi yang dikumpulkan selama proses monev akan menjadi pondasi dan masukan penting bagi unit/lembaga/organisasi/task force PEL dan juga forum kemitraan PEL di daerah untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan memberikan arah yang jelas mengenai tindakan korektif yang akan dilakukan. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan monev akan memperbaiki kualitas PEL secara keseluruhan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan PEL selesai juga bermanfaat untuk mengetahui apakah strategi atau program tertentu yang dibangun untuk memperkuat PEL dapat dijalankan atau tidak. Hal ini nantinya dapat direplikasi di daerah yang lain.

Untuk dapat memperoleh implementasi sebuah kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah

program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak.

Menurut UNESCO Regional Office for Education in Asia and Pasific (seri monograf 3), monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Dengan kata lain monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang suatu program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program tersebut selanjutnya. Jadi monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan hasil akhir dari berupa laporan.

Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan, dan setengahnya lagi oleh fungsi pengawasan atau monitoring. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, (3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program.

Secara lebih terperinci tujuan pelaksanaan monitoring terhadap suatu program/kegiatan adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
- d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;

- e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Berdasarkan kegunaannya, William Travers Jerome menggolongkan monitoring menjadi delapan macam, sebagai berikut:

- a. Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.
- b. Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.
- c. Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
- d. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan.
- e. Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- f. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- g. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- h. Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Monitoring pada umumnya dilakukan pada waktu sebelum kegiatan pembinaan atau bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang

mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program.

Monitoring juga mempunyai hubungan erat dengan evaluasi program. UNESCO (1982) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi. *Pertama*, fokus monitoring adalah pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sementara itu evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. *Kedua*, monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil monitoring dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Monitoring berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas program seperti banyaknya output program, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang efektivitas program seperti sejauhmana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan. *Ketiga*, monitoring mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik, yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan peluasan atau pengembangan program. *Keempat*, kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil monitoring adalah untuk kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program. *Kelima*, monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tekannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas program.

Proses pelaksanaan monitoring membutuhkan data dan informasi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam

pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan monitoring.

Sebagaimana halnya dengan supervisi, monitoring dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh pada penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program.

Langkah-langkah pokok untuk melakukan monitoring adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyusun rancangan monitoring, seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring, e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring, dan f) biaya monitoring. *Kedua*, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. *Ketiga*, menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau

penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

Definisi Evaluasi menurut OECD, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi
8. Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar

mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara rinci Anderson (1978) merumuskan tujuan evaluasi meliputi: (1) Memberi masukan untuk perencanaan program; (2) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program; (3) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat; (4) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1967) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen

dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada;
3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Evaluasi memberikan informasi mengenai:

1. Benar atau tidaknya strategi yang dipakai
2. Ketepatan cara operasi yang dipilih
3. Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program
5. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

B. Tahapan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

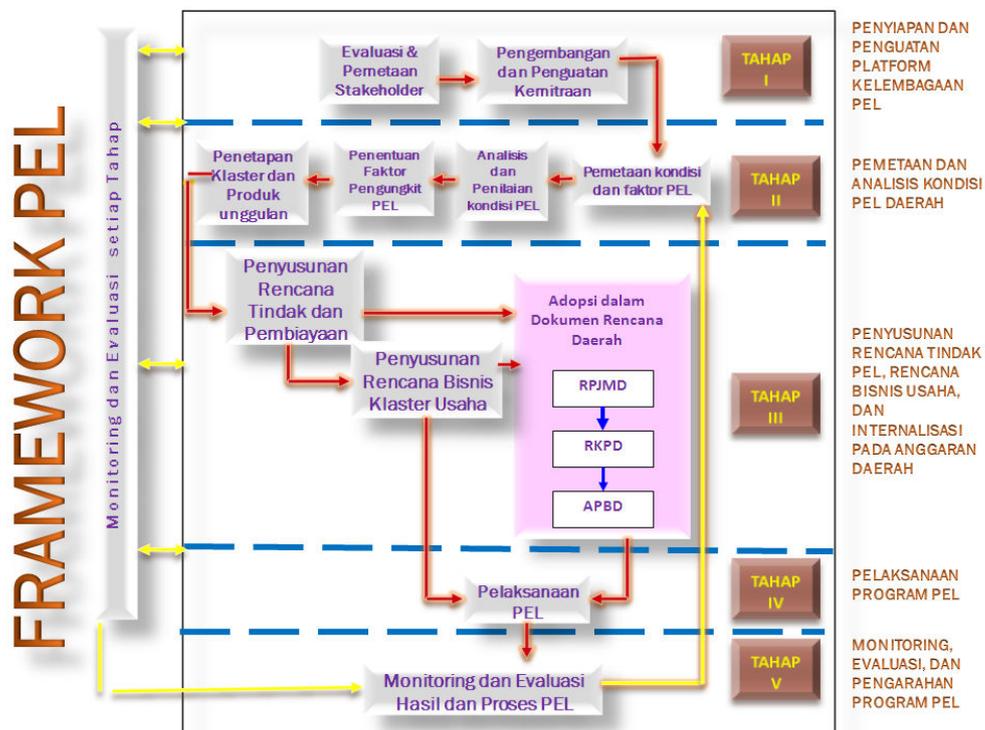
Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi daerah yang berfokus pada sektor-sektor pengungkit yang memberikan pengaruh besar kepada kemajuan sistem perekonomian daerah secara umum. Diharapkan bidang ini menjadi pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dalam mencapai itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap

kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro-PEL atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain kegiatan pengembangan ekonomi lokal, sebagaimana kegiatan publik lain, sifatnya tidak berdiri sendiri dan saling terkait dengan aspek publik lainnya.

Pengembangan ekonomi lokal di daerah secara umum dilakukan melalui berbagai tahapan yang berulang, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap penyiapan dan penguatan platform kelembagaan PEL
- b. Tahap pemetaan dan analisis kondisi PEL daerah
- c. Tahap penyusunan rencana tindak PEL, rencana bisnis dan pengembangan kluster usaha, serta internalisasi pada anggaran daerah.
- d. Tahap pelaksanaan program PEL
- e. Tahap monitoring, evaluasi dan perbaikan program PEL

Skema tahapan pengembangan ekonomi lokal di daerah secara umum sebagai berikut :



Gambar 3.1 Skema Kerangka Pengembangan Ekonomi Lokal

C. Tahapan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Surakarta

Tahapan pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta yang telah berjalan sebagai berikut :

a) Tahap penyiapan dan penguatan platform kelembagaan PEL

Penyiapan dan penguatan platform kelembagaan pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta dilakukan dengan memberdayakan kelembagaan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) yang telah terbentuk. FEDEP Kota Surakarta merupakan forum pada tingkat Kabupaten/Kota berorientasi pada program kemitraan yang terlembaga bagi para stakeholder di daerah, yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi-asosiasi usaha, lembaga perbankan, LSM dan masyarakat. Melalui FEDEP ini para stakeholder dapat secara aktif menyampaikan permasalahan, kebutuhan, keinginan, dan keprihatinan bersama, mengemukakan dan mendiskusikan ide, serta bersama-sama menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal yang hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan mengenai pengembangan ekonomi lokal.

Fungsi dari FEDEP secara umum adalah menjembatani/ mempertemukan pihak-pihak dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan ekonomi lokal, baik dari pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kinerja yang diharapkan dari FEDEP Kota Surakarta antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu melakukan identifikasi dan *assessment* stakeholder terkait yang berkaitan dengan komoditas klaster di daerah.
- b. Membantu melakukan memonitoring dan evaluasi terhadap kinerja keterpaduan program dan kerjasama antara stakeholder produksi dan nilai tambah komoditi klaster di daerah.
- c. Menetapkan skala pengembangan dari komoditi klaster di daerah berdasarkan *assessment* terhadap daya dukung sumber daya yang tersedia untuk ditetapkan menjadi pengembangan skala kota Surakarta.

- d. Memberikan masukan dan saran pertimbangan kepada kepala daerah yang berkaitan dengan sinergitas program lintas sektor antara pariwisata, IKM/UMKM dan pertanian, serta program prioritas yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Kota Surakarta.
- e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya lokal, kerjasama antar kelompok stakeholder klaster di daerah melalui workshop, pelatihan dan forum interaksi/ diskusi dengan menggunakan metode PACA (Participatory Appraisal of Competitive Advantage).

b) Tahap pemetaan dan analisis kondisi PEL daerah

Tahap pemetaan dan analisis kondisi pengembangan ekonomi lokal ini dilakukan pada tahun 2015 melalui sebuah kajian dengan melibatkan beberapa ahli yang berkompeten. Pengumpulan data dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta sebagai responden untuk melakukan penilaian terhadap kondisi pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan klaster unggulan yang akan menjadi fokus pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta. Proses penilaian kondisi pengembangan ekonomi lokal dan penyepakatan klaster unggulan yang akan menjadi fokus pengembangan ekonomi lokal ini dilakukan melalui forum workshop yang dihadiri oleh stakeholder pengembangan ekonomi lokal yang tergabung dalam FEDEP Kota Surakarta, terdiri dari unsur pelaku usaha, Dinas/Instansi terkait dengan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta, perwakilan dari asosiasi-asosiasi usaha, perbankan, dan perwakilan dari perguruan tinggi.

c) Tahap penyusunan rencana tindak PEL, rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha, serta internalisasi pada anggaran daerah.

Penyusunan rencana tindak pengembangan ekonomi lokal ini dilakukan untuk menyusun rencana tindak pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah Kota Surakarta dan dianggarkan dalam APBD Kota Surakarta atau diusulkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam rangka penyusunan rencana bisnis, klaster usaha unggulan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan dialog dan kesepakatan rencana bisnis yang mencakup : (1) konsep bisnis bersama; (2) Rencana kegiatan usaha bersama; (3) rencana pemasaran; (4) Rencana organisasi; dan (5) Rencana keuangan. Hasil rumusan rencana bisnis yang dapat dilakukan secara mandiri dilaksanakan oleh klaster unggulan dengan menggunakan dana klaster sendiri. Sementara itu rencana bisnis yang memerlukan dukungan dari pihak lain diupayakan untuk memperoleh dukungan dari pemerintah daerah yang diadopsi dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD), dan dokumen penganggaran daerah (APBD), dan dukungan CSR perusahaan swasta dan NGO internasional.

d) Tahap pelaksanaan program PEL

Pada tahap ini klaster usaha menjalankan rencana bisnis yang telah disusun pada tahap ke-3 dengan memanfaatkan perangkat kelembagaan klaster yang meliputi: (1) Forum Rembug Klaster (FRK) sebagai media dan kesepakatan antara pelaku usaha dan perangkat pendukungnya untuk menjalankan bisnis plan; (2) Manajer Klaster (BDS) yang bertindak sebagai manajer usaha dan fasilitator klaster yang melakukan kegiatan pengawalan bisnis dan non bisnis; (3) Koperasi sebagai perangkat bisnis FRK; dan (4) unit-unit pendukung usaha klaster lainnya (pengembangan teknologi

dan lainnya) yang dapat berupa yayasan/sub kelompok dalam koordinasi FRK. Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan klaster usaha yang menjadi fokus pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta. Pemerintah kota dapat melakukan berbagai fasilitasi bagi pengembangan bisnis klaster usaha tersebut. Pada tahap ini dunia usaha juga berperan serta untuk mendorong pengembangan klaster usaha melalui dana CSR yang dimilikinya.

e) Tahap monitoring, evaluasi dan perbaikan program PEL

Pada tahap ini program pengembangan ekonomi di Kota Surakarta dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali. Pemantauan dan evaluasi program pengembangan ekonomi lokal pada tingkat pelaku usaha dilakukan secara internal oleh Forum Rembug Klaster (FRK), sedangkan pada lingkup Kota Surakarta dilakukan oleh FEDEP. Untuk menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini akan disusun instrumen (perangkat) monitoring dan evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta. Dengan adanya instrumen tersebut diharapkan dapat diketahui seberapa besar keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Surakarta, sehingga dapat ditentukan perencanaan pengembangan ekonomi lokal pada tahap selanjutnya.

D. Metode Penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Monev Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam rangka penyusunan RAD Tahunan dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta, beberapa hal yang akan disajikan dalam laporan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

a. Menyusun rencana tindak Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Penyusunan rencana tindak pengembangan ekonomi lokal dilakukan dengan menelaah kebijakan dan program RPJMD yang terkait dengan PEL, telaah kebijakan PEL di Provinsi Jawa Tengah, menyusun prioritas PEL Kota Surakarta, dan menyusun rencana program dan kegiatan melalui kegiatan Desk/diskusi dengan perangkat daerah terkait.

Rencana tindak pengembangan ekonomi lokal disajikan dalam format berikut ini.

Program	Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp

b. Menyusun rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha

Rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha PEL mencakup: (1) Konsep bisnis bersama; (2) Rencana kegiatan usaha bersama; (3) Rencana pemasaran; (4) Rencana organisasi; dan (5) Rencana keuangan. Penyusunan Rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha dilakukan dengan menggunakan metode Focused Group Discussion (FGD) dengan peserta terdiri dari anggota kelompok klaster unggulan dan unsur pemerintah daerah.

Rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha PEL disajikan dalam format berikut ini.

No	Nama Klaster	Rencana Bisnis dan Pengembangan Klaster Usaha
1	Klaster 1	
a.	Konsep bisnis bersama	
b.	Rencana kegiatan usaha bersama	
c.	Rencana pemasaran	
d.	Rencana organisasi	
e.	Rencana keuangan	

c. Menyusun rencana pengintegrasian Rencana PEL dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Rencana pengintegrasian PEL disusun dengan terlebih dahulu melakukan telaah terhadap rencana aksi PEL dan rencana bisnis dan pengembangan klaster usaha, dan memadukan kemungkinan pengintegrasian rencana PEL kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

d. Menyusun Instrumen Monitoring Dan Evaluasi PEL

Instrumen monitoring dan evaluasi disusun dalam rangka untuk melihat perkembangan capaian kinerja yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta berdasarkan masing-masing klaster yang ada.

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi

2. Metode Analisis Data

a. SOAR

Kajian singkat tentang sejarah perencanaan strategis selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengalami beberapa perbaikan - tetapi sangat sedikit penyimpangan dari struktur inti yang dimulai dengan analisis SWOT. Keberangkatan terbesar dari perusahaan-perusahaan AS gunakan muncul dalam proses Hoshin Jepang. Paparan proses Hoshin juga menyebabkan pendekatan lain seperti, Sebuah Sistem Berpikir Pendekatan Perencanaan Strategis dan Manajemen (Haines, 2000), Haines mengatakan bahwa kita harus "membasmi cara kuno perencanaan, yang tidak lagi bekerja di dinamis saat ini dunia "(hal. i) (mengacu pada perencanaan strategis tradisional AS). Mengingat perubahan radikal dalam lingkungan yang kompetitif, model lama tidak sampai dengan tugas memproduksi jenis rencana strategi dan strategi yang akan mendorong bisnis ke depan yang berkembang pesat

Suatu kerangka baru yang melibatkan pendekatan menghargai menciptakan masa depan organisasi. Kerangka ini memungkinkan para pemangku kepentingan organisasi untuk melihat di mana mereka hari ini dan membangun visi di mana mereka ingin pergi. Rencana strategis akan menjadi co-creation. Pendekatan baru ini membantu para pemangku kepentingan untuk secara jelas mengidentifikasi, memahami dan yang paling penting, berkomunikasi nilai-nilai individu dan organisasi, arah (visi), tujuan (misi), inti dan kemampuan unik (analisis internal), peluang strategis (analisis eksternal), strategi dan taktik , struktur dan sistem untuk menciptakan lingkungan organisasi yang positif dan membangunya di atas inti positif organisasi untuk mempertahankan nilai unik penawaran (UVO).

Appreciative Inquiry (AI) adalah pendekatan visi berbasis dialog terbuka yang dirancang untuk membantu organisasi dan mitra mereka menciptakan visi bersama untuk masa depan dan misi untuk beroperasi di masa sekarang (Srivastva & Cooperrider, 1990). Organisasi saat ini bisa mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang menghargai penyelidikan, yang mengundang anggota organisasi untuk belajar dan yang menghargai sejarah organisasi dan budayanya. Pendekatan AI memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka (inti positif), menemukan peluang yang menguntungkan, memvisualisasikan tujuan dan alternatif strategi, mengidentifikasi tujuan yang memungkinkan, desain strategi dan taktik yang terintegrasi dengan program mereka yang paling sukses dan mitra rantai pasokan, dan menerapkan rencana strategis yang merupakan dokumen yang dinamis terus menerus, dan hidup. Rencana seperti itu akan mencakup struktur organisasi dan sistem terbaik untuk mewujudkan visinya. Banyak organisasi telah menggunakan AI, termasuk organisasi nirlaba swasta dan publik, organisasi nirlaba, dan pemerintah dan lembaga internasional di seluruh dunia. AI telah memungkinkan ratusan organisasi untuk menemukan dan mengembangkan praktek-praktek terbaik pengembangan kapasitas untuk organisasi mereka serta organisasi rantai nilai pasangannya. Pendekatan AI untuk perencanaan strategis melibatkan identifikasi dan membangun kekuatan yang ada dan peluang yang menguntungkan daripada memikirkan masalah, kekurangan, kelemahan, dan ancaman.

Pikirkan tentang proses perencanaan strategis tradisional- pada intinya adalah analisis tua yang baik siaga SWOT - Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman. Jika kita membagi 50/50, maka akan menghabiskan sekitar setengah dari waktu kita berpikir tentang positif kita (Kekuatan / Peluang) dan pemikiran setengah lainnya tentang negatif kita

(Kelemahan / Ancaman). Tetapi sejujurnya. Meski terlihat 50/50, sifat manusia cenderung berkekuatan secara tidak proporsional pada kelemahan dan ancaman. Sayangnya, dengan berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan salah, kita cenderung memperkuat negatif. Selamat datang di dunia AI, sebaliknya, kita tidak proporsional fokus pada kekuatan kami dan kesempatan, sehingga kita dapat tumbuh mereka sampai mereka mendesak keluar kelemahan dan ancaman.

Pendekatan AI juga membangun kapasitas dengan memindahkan stakeholder asosiasi di luar batas-batas organisasi untuk membentuk hubungan baru dan dengan demikian memperluas potensi organisasi. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Banyak perusahaan yang dibatasi oleh keterbatasan organisasi mereka. Beberapa eksekutif berpikir "di luar kotak" dari perusahaan mereka ketika mereka melakukan brainstorming strategi masa depan mereka.

Salah satu perangkat dari proses perencanaan strategis tradisional adalah bahwa hal itu umumnya dilakukan oleh manajemen puncak. Proses gagal untuk mengumpulkan kearifan dari semua tingkat organisasi. Dalam kegagalan ini, juga mengabaikan pemangku kepentingan untuk mendapatkan buy-in dari orang yang, akhirnya, harus melaksanakan kegiatan yang mendukung rencana strategis. Sebagian besar dari kita memiliki pengalaman di beberapa titik dalam karier kita membuat rencana strategis yang diharapkan untuk dilaksanakan, meskipun kurang masukan dalam pembuatan rencana. AI memungkinkan dan bahkan mendorong semua pihak untuk memiliki suara dalam dialog perencanaan, menyebabkan partisipasi penuh dalam masa depan organisasi, sehingga semua pihak punya hak kepemilikan atas rencana strategis organisasi.

Proses kolaboratif dialog terbuka membantu sebuah organisasi dan mitra-mitranya memahami apa yang terjadi

ketika organisasi mereka bekerja terbaik. Informasi ini digunakan untuk membuat gambar "yang terbaik dari apa yang didapat" untuk masa depan. Kekuatan AI adalah potensinya untuk ikut menciptakan citra visual dari organisasi. Stakeholder berpartisipasi dalam membayangkan satu set berbagi nilai-nilai, visi, misi, tujuan dan sasaran yang memungkinkan, alternatif strategi, program taktis terpadu untuk mendukung strategi yang direkomendasikan, rencana implementasi ditindaklanjuti, dan struktur terbaik dan sistem untuk masa depan yang berkelanjutan.

Keunggulan dari pendekatan AI untuk perencanaan strategis adalah bahwa:

1. Berfokus pada positif kepada orang banyak daripada negatif
2. Membangun kapasitas organisasi melampaui batas-batas yang ada
3. Membangun hubungan dengan mitra
4. Memperoleh masukan dari semua tingkat organisasi
5. Memperoleh buy-in dari semua tingkat organisasi
6. Proses perencanaan menjadi lebih dari sebuah proses yang menggabungkan dan menghubungkan nilai-nilai, visi, dan misi strategis, strategi, rencana dan tinjauan positif dan tujuan tujuan
7. Menciptakan satu set nilai-nilai organisasi dan visi organisasi masa depan secara bersama

AI memungkinkan proses penilaian strategis untuk mengembangkan organisasi dimulai dengan penyelidikan untuk menemukan apa yang telah membuat organisasi sukses di masa lalu dan sekarang. Proses ini membantu untuk membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk masa depan dengan mengidentifikasi Nilai unik organisasi Penawaran (UVO). Fenomena ini terjadi melalui on-going dialog dengan stakeholder organisasi. Melalui dialog ini, cara mengetahui,

menghargai dan belajar tentang sejarah organisasi dan kemampuan inti diperkaya. Cooperrider (1990) menjelaskan sebagai berikut:

"Organisasi adalah, pada tingkat yang jauh lebih besar dari biasanya diasumsikan, sistem afirmatif - mereka dipandu dalam tindakan mereka dengan antisipasi "forestructures" pengetahuan positif yang, seperti proyek film di layar, memproyeksikan cakrawala harapan yang pasti yang memberikan energi, mengintensifkan, dan memprovokasi tindakan di masa sekarang. Para Forestructures atau gambar membimbing masa depan bukan milik individu tetapi melekat dalam pola keterkaitan bentuk dialog dalam pandangan ini Appreciative Inquiry mengacu pada proses mengetahui bahwa satu pertanyaan yang menarik, melampaui penampilan dangkal dengan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih penting dan potensi keberadaan organisasi ". (hal.14)

AI digunakan sebagai penyelidikan dari berbagai perspektif untuk memahami upaya organisasi untuk menciptakan visi, melayani misi, memperoleh tujuan yang diinginkan dan tujuan dan merancang strategi terbaik.

AI terkenal karena 4-D model:

Siklus kegiatan yang melibatkan anggota kelompok, organisasi, atau komunitas melalui empat tahap: penemuan (discovery) - mencari tahu saat-saat tercipta keunggulan, nilai-nilai inti dan praktik terbaik; mimpi (dream) - membayangkan kemungkinan positif; desain (design) - menciptakan struktur, proses dan hubungan yang akan mendukung mimpi, dan tujuan (destiny) – mengembangkan rencana inspirasional efektif untuk implementasi.

AI memiliki peran penting dalam proses perencanaan strategis. Ini menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk menyelesaikan penilaian strategis dan menekankan suatu proses kolaboratif dialog terbuka untuk membantu para

pemangku kepentingan organisasi memahami apa yang mereka lihat terjadi ketika organisasi bekerja yang terbaik. Sebagai pemangku kepentingan mengidentifikasi dan menguraikan "pemberi kehidupan" kekuatan organisasi mereka, bersama-sama mereka dapat membayangkan dan berinovasi masa depan organisasi mereka dengan energi, vitalitas, dan komitmen. Bahasa yang positif dan afirmasi harus sesuai dengan sistem nilai organisasi. Selain itu, proses dapat menjadi pendekatan yang membantu dalam setiap upaya perencanaan strategis karena memerlukan sebuah "visi strategis, tindakan kolektif, banyak pihak dan konteks pemberdayaan untuk inovasi dan pengembangan" (Liebler, 1997, hal. 31).

1. Discover

Orang-orang berbicara satu sama lain, biasanya melalui wawancara terstruktur, untuk menemukan saat-saat ketika organisasi adalah yang terbaik. Cerita-cerita ini dikatakan sebagai kaya mungkin dan dari mereka orang mulai menemukan 'inti positif organisasi, apa yang memberi hidup kepada ketika itu adalah yang terbaik. Orang-orang mulai menghargai diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka dan beberapa transformasi yang cukup signifikan mulai terjadi.

2. Dream

Fase mimpi sering dijalankan sebagai konferensi kelompok besar di sini bagian-lintas organisasi didorong untuk membayangkan dan bekerja sama menciptakan masa depan. Mereka didorong untuk membayangkan organisasi seperti saat-saat puncak ditemukan dalam fase 'temukan' adalah norma daripada pengecualian. "Apa yang akan hal-hal seperti jika ...?" Bekerja dalam kelompok kecil, mereka mencoba untuk menempatkan banyak 'tantangan' pada visi mereka. Ini kemudian 'hasil kerja kreatif disajikan' ke seluruh kelompok dan selanjutnya bekerja.

3. Design

Pada hari-hari awal Appreciative Inquiry tahap desain didelegasikan kepada tim kecil yang diberdayakan untuk merancang cara dan melaksanakannya sehingga organisasi berada dalam konferensi mimpi. Meskipun ini masih terjadi, Gervase Busche telah menemukan bahwa perubahan transformasional lebih mungkin terjadi jika tahap desain dilakukan oleh kelompok selebar mungkin. Dalam pendekatan desain kolaboratif kelompok pertama berawal dari desain peta, yang berisi, dalam tiga lingkaran konsentris, impian untuk organisasi, hubungan kunci yang berdampak pada mimpi itu, dan kunci elemen desain organisasi yang akan diperlukan untuk mewujudkan mimpi.

Dalam kelompok kecil peserta kemudian 'mendaftar' untuk mengeksplorasi elemen desain tertentu, mereka memiliki energi untuk 'proposisi provokatif'. Ini hasil 'kerajinan' kelompok yang menantang organisasi menerima masa depan yang baru dan sehat.

4. Deliver (Destiny)

Tahap akhir adalah untuk memberikan mimpi dan desain baru. Karena istilah 'memberikan' (Deliver) memiliki rasa yang agak mekanis untuk itu, banyak pekerja AI sekarang lebih memilih 'Takdir' (destiny) istilah yang melanjutkan tema menghadapi masa depan. Apapun istilah yang dipilih, tahap akhir adalah salah satu eksperimen dan improvisasi, kadang-kadang digambarkan sebagai 'jazz organisasi'. Tim implementasi kecil akan dibentuk untuk menindaklanjuti elemen desain dan untuk melanjutkan proses apresiatif. Tahap akhir ini merupakan fase tersendiri yang berisi implementasi desain dalam skala kecil pada aspek-aspek tertentu dari suatu organisasi.

The 4-I model

Siklus 4-D tidak satu-satunya cara berpikir tentang proses Appreciative Inquiry. Beberapa penulis telah menawarkan cara lain untuk melihat proses, model 4-I.

1) Initiate (Memulai)

Pada fase ini prinsip-prinsip AI diperkenalkan; tim proyek dibentuk, fokus proyek secara keseluruhan ditentukan; rincian proyek awal diputuskan.

2) Inquire (Meminta Keterangan)

Gunakan wawancara generik; mengembangkan disesuaikan protokol wawancara, melatih pewawancara; melakukan wawancara apresiatif seluas mungkin di seluruh organisasi.

3) Imagine (Beranggapan/Berpendapat)

Menyusun dan berbagi tema kunci dari wawancara, mengembangkan proposisi provokatif yang memberikan visi yang didasarkan dari masa depan yang diinginkan; memvalidasi proposisi dengan orang sebanyak mungkin dalam organisasi.

4) Innovate (Memperbarui/ Mengadakan Perubahan)

Libatkan sebanyak mungkin orang dalam percakapan yang membahas cara-cara baru yang diusulkan kepada organisasi; menerapkan perubahan, meninjau-ulang perubahan secara apresiatif.

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif terutama dilakukan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif gambaran umum wilayah Kota Surakarta terutama yang menyangkut aspek ekonomi (yang meliputi tingkat investasi, PDRB, tingkat inflasi, struktur perekonomian dan indikator makro ekonomi lainnya) serta aspek sarana/prasarana daerah .

c. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis kualitatif menggunakan pola pikir kuantitatif (terukur, teramati, menggunakan logika matematik, dan membuat generalisasi); mengakomodasi deskripsi verbal menggantikan angka, atau menggabungkan olahan statistik dengan olahan verbal dengan pola pikir tetap kuantitatif. Analisis kualitatif terutama digunakan untuk Analisis SWOT. Selain itu pendekatan ini juga dilakukan untuk mendeskripsikan secara kualitatif gambaran umum wilayah Kota Surakarta terutama yang menyangkut aspek geografis, sosial budaya daerah dan pemerintahan umum.

BAB IV

ANALISIS SOAR SENTRA INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA

A. Kondisi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta.

Sentra merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi (Setiawan, 2004).

Definisi Sentra menurut SK Menteri Koperasi dan UKM No: 32 / Kep / M.KUKM / IV / 2002, tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra adalah pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Sentra merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki jenis usaha, produk, dan kelembagaan yang hampir serupa.

Kota Surakarta memiliki sejumlah 31 sentra yang terbagi atas 6 (enam) kategori, yaitu Sentra Makanan; Sentra Batik; Sentra Alat Dapur; Sentra Mebel; Sentra Kriya; dan Sentra Kawasan Kuliner. Jumlah industri yang bergerak sebagai bagian dari sentra mencapai 611 unit. Jumlah industri yang paling banyak jumlah unit usahanya adalah Sentra Batik Laweyan dengan jumlah unit usaha mencapai 90 unit, disusul oleh unit usaha Batik Kauman dan Sentra Mebel Mentari. Adapun dengan

sebaran sentra industri dan usaha di Kota Surakarta secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah
di Kota Surakarta Tahun 2016

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Alamat
1	Sentra Tahu Sumber Rejeki	31	Krajan RT 03 RW 03, Jebres
2	Sentra Tempe Sumber Makmur	20	Sumber RT 02 RW 06, Sumber
3	Sentra Tempe "Putri Mandiri"	20	Pucangsawit RT 04 RW 01, Jebres
4	Sentra Tempe	17	Pajang, Laweyan
5	Sentra Kerupuk	17	Kadipiro, Banjarsari
6	Sentra Karak Bratan	10	Bratan RT 01 RW 06, Laweyan
7	Sentra Batik Laweyan	90	Sayangan Kulon No.9, Laweyan
8	Sentra Batik Kauman	72	Jl. Cakra No. 21, Pasar Kliwon
9	Sentra Batik Warna Alam Semanggi	10	Jl. Serayu 9 No. 5, Pasar Kliwon
10	Sentra Dandang Kompor	10	Semanggi RT 04 RW 17, Pasar Kliwon
11	Sentra Blangkon	10	Potrojayan RT 02 RW 06, Serengan
12	Sentra Shuttlecock	13	Pringgolayan RT 03 RW 09, Serengan
13	Sentra Daur Ulang Kertas Koran	10	Sambirejo RT 03 RW 09, Banjarsari
14	Sentra Kain Perca Sumber Rejeki	20	Tipes RT 01 RW 13, Serengan
15	Sentra Kain Perca Pasori	20	Tipes RT 02 RW 13, Serengan
16	Sentra Pembuatan Cap Batik	15	Bratan RT 5 RW 6, Laweyan
17	Sentra Mebel Mentari	70	Bibis Wetan RT 06 RW 19 No.8, Banjarsari
18	Sentra Sepatu Sandal	20	Kalirahman Rt 04/II Gandekan, Jebres
19	Sentra Sangkar Burung Manunggal	55	Jl. Brig. Katamso Debean RT 04/ V, Jebres
20	Sentra Sangkar Sarana Sejahtera	24	Tanggul Sari RT 3 RW 18, Banjarsari
21	Sentra Letter	32	Jl. Kalilarangan, Serengan
22	Kampung Permata Jayengan	-	Jl.Gatot Subroto No 161, Serengan
23	Makanan Khas Solo	-	Jagalan RT 1 / RW XI, Jebres
24	Makanan Khas Solo	-	Koridor Jl.Gatot Subroto
25	Makanan Khas Solo	-	Koridor Ngarsopuro
26	Sentra Alat Rumah Tangga Kabangan	25	Jl.Dr.Rajiman No.522, Laweyan

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Alamat
27	Kampung Sayur RW 37	-	Jl.Ngemplak Sultan, Jebres
28	Unagi kabayaki	-	
29	Galabo (malam)	-	Jl.Mayor Sunaryo, Pasar Sawit
30	Galabo PKL (pagi)	-	Jl.Mayor Sunaryo, Pasar Sawit
31	Kawasan kuliner Pucangsawit	-	Jl.Ir. Juanda, Jebres

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2016.

Sentra industri kecil dan menengah di Kota Surakarta merupakan usaha padat karya yang dapat menyerap sebanyak 2.882 orang pada tahun 2016. Sentra yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sentra Batik Laweyan dan Batik Kauman yaitu masing-masing sebesar 750 orang dan 540 orang. Total investasi seluruh sentra di Kota Surakarta mencapai Rp 18.091.900.000 (Delapan Belas Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribuan Rupiah). Sentra yang memiliki nilai investasi besar adalah Sentra Batik Laweyan yaitu mencapai Rp 8.900.000.000 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Sentra Batik Kauman sebesar Rp 7.200.000.000 (Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). Secara rinci nilai investasi masing-masing sentra dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.
Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta Tahun 2016

No	Nama Sentra	Jml Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)
1	Sentra Tahu Sumber Rejeki	76	100.000
2	Sentra Tempe Sumber Makmur	50	64.800
3	Sentra Tempe "Putri Mandiri"	53	65.800
4	Sentra Tempe	56	77.000
5	Sentra Kerupuk	62	57.000
6	Sentra Karak Bratan	50	313.000
7	Sentra Batik Laweyan	750	8.900.000
8	Sentra Batik Kauman	540	7.200.000
9	Sentra Batik Warna Alam	50	235.500

No	Nama Sentra	Jml Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)
	Semanggi		
10	Sentra Dandang Kompor	34	82.800
11	Sentra Blangkon	47	16.500
12	Sentra Shuttlecock	26	65.000
13	Sentra Daur Ulang Kertas Koran	50	56.000
14	Sentra Kain Perca Sumber Rejeki	20	10.000
15	Sentra Kain Perca Pasori	20	10.000
16	Sentra Pembuatan Cap Batik	28	43.000
17	Sentra Mebel Mentari	235	276.000
18	Sentra Sepatu Sandal	64	66.000
19	Sentra Sangkar Burung Manunggal	170	121.450
20	Sentra Sangkar Sarana Sejahtera	25	33.850
21	Sentra Letter	86	298.200
22	Kampung Permata Jayengan	250	
23	Makanan Khas Solo	-	-
24	Makanan Khas Solo	-	-
25	Makanan Khas Solo	-	-
26	Sentra Alat Rumah Tangga Kabangan	-	-
27	Kampung Sayur RW 37	30	-
28	Unagi kabayaki	-	-
29	Galabo (malam)	38	-
30	Galabo PKL (pagi)	57	-
31	Kawasan kuliner Pucangsawit	15	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2016.

Sentra yang memiliki nilai produksi paling tinggi adalah sentra Batik Laweyan dan Batik Kauman yaitu masing-masing sebesar Rp 45.000.000.000 dan Rp 34.560.000.000. Secara rinci nilai produksi masing-masing sentra dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.
Kapasitan dan Nilai Produksi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta Tahun 2016

No	Nama Sentra	Kapasitas		Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai BB/BP (Rp. 000)
		Jumlah	Satuan		
1	Sentra Tahu Sumber Rejeki	23.500	papan	470.000	188.000
2	Sentra Tempe Sumber Makmur	296.000	bungkus	296.000	118.400
3	Sentra Tempe "Putri Mandiri"	301.000	bungkus	301.000	120.400
4	Sentra Tempe	396.000	bungkus	396.000	158.400
5	Sentra Kerupuk	-	-	261.500	104.600
6	Sentra Karak Bratan	328.732	kg	1.599.680	639.872
7	Sentra Batik Laweyan	172.800	Pcs	45.000.000	18.000.000
8	Sentra Batik Kauman	40.260	pcs	34.560.000	13.824.000
9	Sentra Batik Warna Alam Semanggi	40.260	pcs	10.840.400	4.336.160
10	Sentra Dandang Kompor	20.580	unit	1.589.600	635.840
11	Sentra Blangkon	7.920	unit	198.000	79.200
12	Sentra Shuttlecock	31.200	slop	1.404.000	561.600
13	Sentra Daur Ulang Kertas Koran	9.760	unit	244.000	97.600
14	Sentra Kain Perca Sumber Rejeki	144.000	stel	432.000	172.800
15	Sentra Kain Perca Pasori	144.000	stel	432.000	172.800
16	Sentra Pembuatan Cap Batik	1.312	unit	907.200	362.880
17	Sentra Mebel Mentari	1.325	unit	1.324.500	529.800
18	Sentra Sepatu Sandal	11.400	unit	342.000	136.800
19	Sentra Sangkar Burung Manunggal	32.829	unit	1.641.430	656.572
20	Sentra Sangkar Sarana Sejahtera	16.216	unit	434.928	173.971
21	Sentra Letter	54.198	pasang	1.907.960	763.184
22	Kampung Permata Jayengan	tad	tad	tad	tad
23	Makanan Khas Solo	tad	tad	tad	tad
24	Sentra Alat Rumah Tangga Kabangan	tad	tad	tad	tad
25	Kampung Sayur RW 37	tad	tad	tad	tad
26	Unagi kabayaki	tad	tad	tad	tad
27	Galabo (malam)	tad	tad	tad	tad
28	Galabo PKL (pagi)	tad	tad	tad	tad
29	Kawasan kuliner Pucangsawit	tad	tad	tad	tad

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2016.

B. Analisis SOAR

1. Keunggulan.

Keunggulan Sentra di Kota Surakarta pada umumnya mempunyai potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif yang nyata dibandingkan dengan daerah lainnya. Keunggulan-keunggulan (strengths) ini dapat digambarkan seperti berikut.

a) Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bekerja di sentra ini pada umumnya telah mempunyai ketrampilan yang memadai, sehingga mereka mampu membuat desain produknya sendiri, seperti Shuttle Cock, Tas Batik, Mebel. Namun terdapat juga UKM Batik, Gamelan dan Sangkar Burung, yang belum mempunyai tenaga desain sendiri, sehingga dimungkinkan mereka menggunakan tenaga dari pihak lain atau cara lainnya seperti meniru desain produk yang telah dipasarkan.

Hubungan antara pengusaha UKM ini dengan para tenaga kerjanya dapat dikatakan harmonis. Hal ini mempunyai dampak semangat kerja dan produktivitas kerja pada level memadai (mampu mencapai target yang diharapkan). Kalaupun terjadi ketidakharmonisan dalam bekerja merupakan hal yang wajar, selama konflik ini tidak menimbulkan tindakan anarkhis atau yang menjurus kepada kerusakan hubungan kerja yang telah dibina baik. Ketidakharmonisan ini seperti desain produk yang belum sesuai harapan pemilik UKM atau terjadi produk yang rusak pada saat proses produksi berlangsung; dapat pula terjadi *human error* suatu kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja.

b) Penjualan

Produk yang dibuat oleh UKM pada Sentra ini dibuat berdasarkan produk masal. Artinya produk dibuat oleh pengusaha batik, misalkan, bukan atas pesanan pelanggan; kemudian mereka jual secara grosiran dan eceran kepada

pelanggan. Walaupun demikian, para UKM tetap menerima pesanan sebagaimana yang diminta para pelanggannya. Hal ini mereka laksanakan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan UKM baik desain maupun jumlahnya, sehingga UKM dapat menyelesaikan pesanan pada waktunya.

Hasil penjualan UKM pada Sentra ini setidaknya dapat menutup biaya produksi dan dapat memberikan penghasilan pada para UKM. Keuntungan hasil penjualan belum optimal seperti harapan mereka (kurang lebih 10% dari harga pokok penjualan).

c) Lahan

Lahan yang digunakan untuk proses produksi para UKM pada umumnya tidak cukup luas jika untuk pengembangan tempat usaha. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka tempat usaha dan tempat tinggal menjadi satu sehingga lahan yang mereka miliki dibagi dua bagian yaitu sebagian untuk produksi sebagian yang lainnya digunakan sebagai rumah tempat tinggal. Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan kesulitan pada pengembangan pisik pabriknya. Hasil produksi mereka menimbulkan polusi lingkungan tetapi tidak sampai parah artinya polusi (limbah cair umumnya) ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi penduduk setempat. Selain itu, lahan yang mereka gunakan untuk usaha dapat dijangkau oleh angkutan umum dengan mudah. Hal ini merupakan keunggulan baik dari sisi pemasaran (dapat dijangkau pelanggan) maupun dari sisi produksi yaitu pengangkutan bahan baku dan barang jadi dari dan ke tempat tujuan dapat dilaksanakan dengan baik/lancar.

2. Capaian Yang Dibanggakan

a) Produksi

Produk UKM ini sudah mendapatkan pengakuan/penghargaan dari para pelanggannya. Sebagai gambaran, produk batik UKM di Surakarta mempunyai potensi

pasar yang dapat diperluas dikemudian hari. Namun demikian, produksi sentra ini belum mempunyai standar nasional Indonesia (SNI) baik dari sisi bahan baku, proses produksi, dan dari sisi produk jadi. SNI ini untuk menjamin setidaknya proses produksi tidak mencemari lingkungan dan produk yang dibuat aman dari bahan yang berbahaya.

Proses produksi yang dilaksanakan oleh Para UKM di sentra ini masih menggunakan teknologi sederhana atau tradisional. Hal ini tidak menghambat proses produksinya sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Apabila produk sentra ini mempunyai sertifikat SNI dengan teknologi tradisional maka ini merupakan suatu keunggulan yang istimewa.

b) Penjualan (dari sisi pasar)

Penjualan hasil produksi mereka masih lebih banyak memenuhi permintaan pasar domestik, dari segi kualitas dan kuantitas belum berlimpah sehingga dapat untuk menerobos pasar luar negeri. Hal ini juga dikarenakan terkadang mereka (UKM di sentra batik dan sangkar burung, gamelan) memenuhi pesanan para pelanggannya sekalipun tidak selalu mendapatkan pesanan ini setiap harinya.

Para pelanggan mereka selain tertarik dengan desainnya juga dikarenakan harga jual yang terjangkau oleh pelanggan, sehingga omzet penjualannya dapat menutup kebutuhan keluarga. Namun demikian, masih banyak dari mereka para UKM di sentra ini belum terbiasa dengan membuat target penjualan (secara tertulis). Ini memang bukan keharusan tetapi menjadi acuan tertulis lebih dapat memberikan gambaran atau visualisasi apa yang akan dicapai sehingga memberikan motivasi kerja yang lebih baik. Bagi yang sudah membuat target tertulis mereka dapat memataui kemajuan target seperti rata-rata mereka dapat mencapai antara 75-90% dari target penjualannya.

c) Penghargaan

Pada umumnya, UKM di sentra ini belum mendapatkan penghargaan secara regional nasional dan internasional atas prestasi penciptaan dan atau produksi batik khas Surakarta.

d) Dukungan

Para UKM mengaku mendapat dukungan dari pihak pemerintah walaupun belum menjangkau semua pengusaha UKM di Surakarta. Dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta yang mereka terima seperti Pelatihan, Bantuan Pengadaan Peralatan dan pameran. Namun, dukungan dari Pemerintah Pusat dan dari pihak swasta, belum pernah mereka terima.

Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membantu para pelaku UKM sehingga mereka dapat tetap hidup dan dapat membantu pemerintah dalam pengurangan pengangguran domestik.

3. Kekuatan Yang Menunjukkan Kemampuan

a) Paguyuban

Paguyuban merupakan asosiasi yang dapat menjadi ujung tombak bagi UKM untuk mempertahankan bisnisnya, misalkan, membeli bersama bahan baku dan lainnya. Para UKM di sentra ini belum semua menjadi anggota paguyuban dan atau menjadi pengurusnya.

b) Inovasi

Para pengusaha UKM sering membuat desain baru agar dapat mendorong permintaan pasarnya. Demikian juga produk baru yang dapat ditawarkan kepada pasar yaitu para pelanggannya atau calon pembeli.

Para UKM untuk mencapai itu banyak diantara mereka yang melakukan pembaharuan proses produksinya dan selalu

berusaha mendapatkan bahan baku alternative. Hal ini mendorong merekaselalu mencari terobosan penjualan.

c) Mitra Kerja

SDM yang berada di lingkungan sentra industri batik selalu rajin bekerja / teratur bekerja, sehingga para pengusaha UKM dapat memberikan peluang tenaga kerjanya/SDM dapat bekerja tanpa pengawasan. SDM yang dimiliki para pengusaha UKM pada sentra ini sudah pada tingkat mahir pada bidangnya.

Hal lainnya yang perlu dikembangkan oleh sentra ini adalah mempunyai hubungan kemitraan dengan pemasok bahan baku, agar supaya penyediaan bahan baku tidak terhenti atau jeda yang terlalu lama sehingga mengganggu kelancaran produksi.

4. Peluang

Peluang yang dapat dimasuki oleh para UKM dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut.

a) Ancaman dari Luar

Ancaman dari luar bukan berarti ancaman dari luar negeri saja, seperti misalkan batik buatan China atau Malaysia, melainkan juga dari pabrik batik dari luar daerah Surakarta. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat atau mendirikan himpunan atau paguyuban industri sejenis sehingga ada tindakan bersama dalam mengatasi masalah ancaman produk dari luar. Rencana tindakan yang harus mereka buat merupakan suatu tindakan terencana yang dapat menghindarkan tindakan mengatasi ancaman secara kasar.

b) Membuat Kesempatan

Kesempatan bisnis dapat diraih dengan meningkatkan mutu bahan baku, dan harus diiringi oleh peningkatan mutu proses produksinya. Hal ini dapat dicapai apabila para pelaku atau

pengusaha UKM bersedia menguji produk jadi dengan memenuhi persyaratan SNI.

Lembaga pemerintah Kota yang berwenang menangani UKM dapat sebagai ujung tombak usaha di bidang batik untuk meningkatkan mutu produknya.

Perbaikan mutu produk berarti memperluas jangkauan pemasaran dengan suatu sistem yang legal, artinya sistem ini bekerja dalam lingkungan hukum negara dan peraturan daerahnya. Selain itu para UKM perlu secara periodik menambah teknik produksi, desain, kemampuan manajerial, sehingga pada saat bantuan dari Pemerintah dilepas dapat berdiri di atas kaki sendiri.

c) Tuntutan Pengembangan Perusahaan

Perusahaan yang maju tidak harus menjadi perusahaan raksasa tetapi perusahaan yang meminta kita melakukan sesuatu untuk perbaikan dalam segala aspeknya sehingga dapat berkembang sesuai dengan era kemajuan masyarakatnya. Pengembangan usaha berarti pula SDM perusahaan perlu ditingkatkan ketrampilannya (skill) sehingga spesialisasi SDM di perusahaan dapat mumpuni dalam produksi dan pemasarannya. Lebih lanjut perusahaan perlu sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan dan sistem keamanan dan keselamatan kerja agar supaya lingkungan hidup dan kehidupan semua pihak terjamin.

d) Menjadi Mitra Terbaik Orang Lain

Para UKM di sentra ini selayaknya bermitra terbaik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai wujud kerja sama antara Pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Demikian juga demi kelancaran produksinya, maka UKM perlu bermitra terbaik dengan pemasok bahan baku sehingga terjalin rantai pasokan yang tiada henti.

Bermitra terbaik dengan para pelanggan merupakan relationship marketing yang saat ini banyak sudah dilaksanakan oleh banyak perusahaan kecil menengah dan besar. Pelanggan sebagai mitra perusahaan merupakan jaminan pemasaran jangka panjang.

Para UKM di sentra ini mempertimbangkan pendapat orang lain, khusus ahlinya sehingga mereka dapat mencoba pendapat atau masukan baru. Dengan demikian perlu sarasehan dengan para mitra sekali waktu.

5. Aspirasi

Gagasan yang akan dilaksanakan merupakan aspirasi untuk memajukan usaha UKM di sentra ini dengan menimbang beberapa hal seperti berikut ini.

a) Menimbang Keunggulan dan Peluang

Para pengusaha UKM mempunyai cita-cita menjadikan daerah ini sentra industri anda kelas wahid, maka dari itu mereka harus menjalin hubungan baik saling pengertian di antara pengrajin. Hal ini lah yang dapat dijadi dasar agar para UKM dapat diajak bersatu dalam satu organisasi, sehingga peran pemerintah daerah sebagai pembina dan pemersatu masyarakat dapat dihandalkan.

b) Nilai-Nilai Sosial

Para UKM untuk bersosialisasi dengan sesamanya dapat saling bertukar pengalaman satu dengan lainnya, mereka saling bantu dalam mengatasi suatu masalah. Hal ini dapat terjadi apabila mereka berkenan bergabung dalam satu organisasi, seperti sentra atau cluster bisnis.

Semboyan mereka adalah Maju Bersama, Berkembang Bersama, Menambah Pengalaman Ide Dan Peluang Usaha Yang Lebih Baik Lagi

6. Results

Bisnis yang dapat maju adalah bisnis yang diperhitungkan hasil yang akan dicapai masa yang akan datang, sehingga visualisasi hasil dapat sebagai motivasi bekerja, seperti berikut ini.

a) Hasil yang dapat diukur

Banyak UKM yang masih belum melakukan sesuatu untuk kepentingan bisnisnya seperti berikut ini

Volume penjualan selama ini belum dicatat, sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan penjualannya. Dengan demikian mereka tidak mengetahui prosentase kenaikan yang diharapkan setiap tahun.

Sisa produksi dari volume penjualan selama ini juga belum diketahui sehingga tanpa disadari mereka menanam modal yang tidak produktif. Sementara itu berapa produk rusak / cacat setiap kali produksi belum juga dicatat sehingga dapat dipastikan produk cacat atau rusak setiap saat menambah biaya produksi yang tidak pernah diperhitungkan, merupakan kerugian potensial.

b) Promosi kepada siapa

Bentuk promosi yang UKM ingin lakukan adalah Pameran Dalam Dan Luar Negeri . Penjualan Online Dan Display Di Toko, dengan frekuensi promosi ingin dilakukan tiap hari. Selain itu mereka melakukan memperbaharui dan Menambah Produk Produk Baru Di Internet/ Sosial Media.

c) Mewujudkan Secara Kongkrit Kekuatan, Peluang, Dan Aspirasi

Pelaksanaan keinginan tersebut dapat melalui Pembinaan sistem manajemen mutu akan dilaksanakan pada waktu yang tepat. Strategi yang dapat dijalankan seperti bila tahun depan didirikan satu lembaga / organisasi (paguyuban) yang merupakan gabungan dari pengrajin-pengrajin di daerah sehingga biaya

pembenahan sistem manajemen mutu ditanggung bersama akan terasa biaya murah. Perkembangan bisnis yang saat ini dan dua tahun ke depan organisasi tersebut dapat melaksanakan sistem frenchise untuk memperluas pasar produk UKM.

BAB V

RENCANA AKSI TAHUNAN

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

A. Telaah RPJMD dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Visi

Visi Walikota–Wakil Walikota Surakarta terpilih Tahun 2016–2021, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah :

TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) Budaya

Surakarta sebagai **Kota Budaya** mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis, rasional , berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** memiliki dimensi utama, yaitu secara individu memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab, menjunjung tinggi kerukunan dan harmoni sosial. Selain itu, kota budaya juga berarti pengembangan kota terintegrasi dengan upaya melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar budaya. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan

dalam Misi **Wasis**, **Mapan**, dan **Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Wasis	Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga	1. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya (%) 2. Tingkat prestasi pemuda dan olah raga (%)
Mapan	Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
Papan	Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Persentase Sarana dan Prasarana (%): 1. kegiatan sosial dan budaya yang representatif 2. kegiatan ekonomi yang representatif

b) Mandiri

Mandiri dalam visi dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Kemandirian daerah diupayakan melalui penguatan kemampuan inovatif pemerintah daerah, sosial dan budaya serta penguatan keberdayaan masyarakat Kota Surakarta. Penjabaran Visi Mandiri akan diterjemahkan dalam Misi Wasis, Wareg, dan Mapan, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Wareg	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Tingkat Kemiskinan (%) 3. Indeks Gini 4. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)
Mapan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i>	Rata rata nilai survey kepuasan masyarakat

c) Maju

Maju diterjemahkan sebagai kondisi Kota Surakarta dengan masyarakatnya yang memiliki ciri-ciri keunggulan. Indikator keunggulan dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kreatif. Keunggulan masyarakat dilandasi oleh kepribadian masyarakat yang berakar dan tumbuh dari kehidupan bangsa Indonesia yang adiluhung jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, serta sikap dan perilaku gotong royong sehingga mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsanya untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ditinjau dari aspek sosial dan kependudukan, indikator kemajuannya antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil dan dengan derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi, tingginya kualitas pelayanan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan.

Ditinjau dari aspek ekonomi kemajuan antara lain ditandai dengan penduduk memiliki kesempatan bekerja yang lebih terbuka, berkembangnya sektor industri yang beragam, semakin tingginya tingkat kemakmuran dan pemerataannya. Keterpaduan berbagai unsur ekonomi yang mampu menghasilkan efek ganda dalam

mendorong semakin majunya perekonomian daerah, disamping semakin tertata dan berfungsinya dengan baik berbagai lembaga dan pranata ekonomi dalam mendukung kemajuan dan stabilitas perekonomian.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang baik, kemajuan juga ditandai dengan kualitas infrastruktur semakin mantap, sistem dan kelembagaan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, akses pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil dan inklusif sehingga mendukung mantapnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan dan inklusif dilihat dari sisi gender, kelompok sosial ekonomi, maupun kelompok kewilayahan. Penjabaran Visi Maju akan diterjemahkan dalam Misi **Waras**, **Wasis**, **Wareg**, **Mapan**, dan **Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Waras	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	Rata-rata lama sekolah (tahun)
Wareg	Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	1. Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%) 2. Tingkat inflasi (%)
Mapan	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD RKPD
Papan	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	Persentase luasan Kawasan Kumuh (%)

d) Sejahtera

Sejahtera mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Sejahtera lahir berarti kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta kemampuan daya beli. Sejahtera batin berarti ketenteraman, keamanan, kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Penjabaran Visi Sejahtera akan diterjemahkan dalam Misi **Waras**, **Wasis**, **Wareg**, **Mapan**, dan **Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Waras	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	Angka Harapan Hidup (tahun)
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)
Wareg	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Pendapatan per kapita (rupiah) 2. Pengeluaran per kapita (rupiah)
Mapan	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD dan RKPD
Papan	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	Infrastuktur Kota dalam kondisi baik (%)

Visi tersebut bermakna bahwa pembangunan Kota Surakarta tahun 2016–2021 akan mewujudkan tatanan kota dan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepribadian bangsa (**kota budaya**), mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dan proaktif membangun jejaring (**mandiri**), memiliki ciri-ciri keunggulan kompetitif (**maju**), dan terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani dalam kondisi kota yang kondusif untuk tempat tinggal maupun bekerja (**sejahtera**).

2. Misi

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.”** Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan dengan meyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkeadilan, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Berdasarkan analisis Visi dan Misi Kota Surakarta yang tertuang dalam RPJMD diatas, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) memiliki peran yang sentral dalam pembangunan Kota Surakarta. Pengembangan Ekonomi Lokal memiliki keterkaitan dengan Visi maupun beberapa Misi, antara lain:

1. Frase Budaya, dengan Tujuan:

Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan ditandai dengan indikator kegiatan ekonomi yang representatif.

2. Frase Maju, dengan tujuan:

Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri dan ditandai dengan indikator: 1) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB; dan 2) Tingkat Infasi.

3. Frase Sejahtera, dengan tujuan:

Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani. Indikator untuk tujuan ini adalah pendapatan per kapita.

B. Identifikasi Program dan Kegiatan Renstra OPD yang Mendukung terhadap PEL.

Pasal 272 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis menjadi dokumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah menjabarkan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota kedalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021, dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Dokumen Renstra juga menjadi dasar dari perencanaan di masing-masing perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan setiap tahunnya; tidak terkecuali dalam penentuan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta. Pada tahapan penyusunan dokumen PEL sebelumnya, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun rencana aksi yang dijabarkan dalam Renstra OPD. Adapun Program dan Kegiatan OPD yang mendukung terhadap PEL adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
- b. Membangun jejaring dengan eksportir

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

- a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
- b. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
- c. Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

5) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

- a. Pengembangan klaster bisnis

6) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri

7) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

- a. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
- b. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
- c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
- d. Kegiatan Pemberian fasilitasi kemudahan akses Perbankan Bagi IKM

9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

10) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- a. Pembangunan jalan (di kawasan industri).

Tabel 5.1.
Program dan Kegiatan Renstra OPD yang Mendukung terhadap Pengembangan Klaster Industri
Di Kota Surakarta Tahun 2018-2021

No	Program	Kegiatan	2018	2019	2020	2021	Penanggung Jawab
			Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	Dinas Perdagangan
		Membangun jejaring dengan eksportir	215.000.000	220.000.000	225.000.000	240.000.000	Dinas Perdagangan
2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	7.000.000	8.000.000	9.500.000	11.000.000	Dinas Perdagangan
		Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	650.000.000	675.000.000	750.000.000	800.000.000	Dinas Perdagangan
		Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri	1.100.000.000	8.000.000.000	10.800.000.000	12.960.000.000	Dinas Perdagangan
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	168.792.500	133.100.000	146.410.000	150.000.000	Dinas Koperasi UMKM
		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1.529.000.000	1.697.900.000	1.917.690.000	1.784.126.000	Dinas Koperasi UMKM
4.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	195.500.000	266.200.000	292.820.000	317.820.000	Dinas Koperasi UMKM
5.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pengembangan klaster bisnis	355.524.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	Dinas Koperasi UMKM
6.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	650.000.000	700.000.000	750.000.000	750.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Program	Kegiatan	2018	2019	2020	2021	Penanggung Jawab
			Rp	Rp	Rp	Rp	
7.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	200.000.000	208.000.000	215.000.000	220.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	1.310.000.000	1.415.000.000	1.520.000.000	1.625.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	543.250.000	747.575.000	972.332.500	1.219.565.750	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Kegiatan Pemberian fasilitasi kemudahan akses Perbankan Bagi IKM	1.452.000.000	1.597.200.000	1.756.920.000	1.932.612.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	21.000.000	24.000.000	27.000.000	30.000.000	Dinas Kesehatan
10.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan	2.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C. Rencana Bisnis Pengembangan Klaster Usaha.

Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Bisnis Klaster Usaha yang tercantum dalam dokumen ini merupakan kegiatan yang bersifat indikatif dan multisektor; dengan artian merupakan integrasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak seperti pelaku usaha, pemberi modal, perusahaan skala besar, maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka penjabaran kedalam Rencana kerja, telah dilakukan analisis terhadap kebutuhan masing-masing klaster sebagaimana tercantum dalam hasil *Focussed Group Discussion* (FGD). FGD yang dilakukan pada tanggal 28 September 2017 dilakukan dengan mengelompokkan klaster menjadi 7 klaster, antara lain:

- 1) Klaster Batik;
- 2) Klaster Makanan;
- 3) Klaster Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Klaser *Shuttle Cock*;
- 5) Klaster Sangkar Burung; dan
- 6) Klaster Mebel.

Tabel 5.2.
Rencana Bisnis Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah
Di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Sentra Batik					
1.	Konsep bisnis bersama					
	- Pembentukan asosiasi batik	v			v	
	- Pertemuan pengembangan pasar bersama dengan asosiasi		v			v
	- Rapat koordinasi penentuan Harga Standar Pasar	v	v	v	v	v
	- Penyusunan mekanisme sub-kontraktor dalam penyelesaian order besar.		v			
2.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan desain batik	v	v	v	v	v
	- Pembuatan IPAL Komunal bagi pelaku usaha yang belum memiliki instalasi limbah			v		
	- Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	v	v	v	v	v
	- Sertifikasi produk sesuai dengan standar		v		v	
3.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui	v	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	platform <i>daring</i>					
	- Pembangunan sentra promosi batik secara mandiri oleh asosiasi				v	
4.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v
B.	Sentra Makanan					
1.	Konsep bisnis bersama					
	- Pembentukan asosiasi klaster makanan	v			v	
2.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan diversifikasi produk	v	v	v	v	v
	- Pembuatan IPAL Komunal bagi pelaku usaha yang belum memiliki instalasi limbah					v
	- Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	v	v	v	v	v
	- Pengenalan alat produksi ramah lingkungan dan tepat guna		v		v	v
	- Sertifikasi produk untuk mendapatkan P-IRT, Sertifikasi Halal, dan Aman dari BPOM		v		v	
3.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Kerjasama kepada penyalur/distributor produk pada beberapa toko penjual makanan	v	v	v	v	v
4.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v
C.	Sentra Peralatan Rumah Tangga					
1.	Konsep bisnis bersama					
	- Pembentukan asosiasi klaster peralatan rumah tangga	v			v	
2.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan pengembangan desain produk	v	v	v	v	v
	- Pengenalan alat produksi ramah lingkungan dan tepat guna		v		v	v
3.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Kerjasama kepada penyalur/distributor produk pada beberapa toko penjual makanan	v	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v
D.	Sentra Shuttle Cock					
1.	Konsep bisnis bersama					
	- Reorganisasi asosiasi <i>shuttle cock</i>	v			v	
	- Pertemuan pengembangan pasar bersama dengan asosiasi		v			v
	- Rapat koordinasi penentuan Harga Standar Pasar	v	v	v	v	v
	- Penyusunan mekanisme sub-kontraktor dalam penyelesaian order besar.		v			
2.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	v	v	v	v	v
	- Sertifikasi produk sesuai dengan SNI		v		v	
3.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Membangun kerjasama dengan Institusi olahraga		v		v	

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Badminton					
4.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v
E.	Sentra Sangkar Burung					
1.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan desain sangkar burung	v	v	v	v	v
	- Pelatihan produksi sangkar burung	v	v	v	v	v
	- Pelatihan penggunaan dan penerapan alat produksi modern dan tepat guna		v		v	
2.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara personal maupun kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- <i>Personal dan direct selling</i>	v	v	v	v	v
3.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v

No	Rencana Aksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
F.	Sentra Mebel					
4.	Rencana kegiatan usaha bersama					
	- Pelatihan desain mebel	v	v	v	v	v
	- Pelatihan produksi mebel	v	v	v	v	v
	- Pelatihan penggunaan alat produksi modern dan tepat guna		v		v	
5.	Rencana pemasaran					
	- Pemasaran produk secara personal maupun kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	v	v	v	v	v
	- <i>Personal</i> dan <i>direct selling</i>	v	v	v	v	v
6.	Rencana keuangan					
	- Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	v	v	v	v	v
	- Pelatihan pengelolaan keuangan	v	v	v	v	v

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

A. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut. Dalam seri monograf 3, *UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pasific*, dijelaskan bahwa monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Suherman dkk (1988) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus.

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan

keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Proses pengambilan keputusan berjalan atau berhentinya/perubahan sebuah atau beberapa program yang berkaitan dilakukan melalui proses evaluasi. Fungsi Pengawasan dalam kerangka kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap stakeholder yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Membidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Evaluasi menurut Moh. Rifai (1986) sebagai kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan monitoring memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan;
2. Evaluasi sebagai alat perencanaan;
3. Evaluasi sebagai alat perbaikan.

Dengan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa fungsi monitoring yang pokok adalah: mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati; menganalisa semua hasil pemantauan (monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan (Soewardji Lazaruth : 1994).

Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya sustainability kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut:

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Nanang Fattah (1996) mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat

Beberapa pakar manajemen mengemukakan bahwa fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conon (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring).

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan kegunaannya, William Travers Jerome menggolongkan monitoring menjadi delapan macam, sebagai berikut:

- a) Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.
- b) Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.

- c) Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
- d) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan.
- e) Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- f) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- g) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- h) Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program.

Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki

program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan monitoring.

Monitoring dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh para penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggara atau pelaksana program.

Langkah-langkah pokok untuk melakukan monitoring adalah sebagai berikut.

Pertama, menyusun rancangan monitoring, seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring, e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring, dan f) biaya monitoring. Rancangan ini didiskusikan dengan pengelola dan penyelenggara program untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaannya. Hasil penyempurnaan ini dapat disebut program monitoring.

Kedua, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama.

Ketiga, menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

Evaluasi program merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Evaluasi adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen, evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah program, arahan program, atau prakarsa lainnya menuju pada tujuan akhir yaitu menghasilkan keputusan mengenai penerimaan, penolakan atau perbaikan inovasi. Berbeda dengan assessment atau penilaian, yang meliputi metode untuk mengukur atau menguji kinerja dalam suatu kompetensi. Evaluasi adalah istilah yang lebih menyeluruh, sering menggunakan data penilaian sebagai tambahan terhadap jenis data lainnya yang dijadikan sumber.

Evaluasi program berfungsi sebagai pengarah kegiatan dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan evaluasi program. Evaluasi pada umumnya berkaitan dengan upaya

pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (decision making). Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Anderson (1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

- a) Memberi masukan untuk perencanaan program
- b) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program
- c) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
- d) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1967) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kemudian Stufflebeam juga membedakan sesuai di atas yaitu Proactive Evaluation untuk melayani pemegang keputusan dan Retroactive Evaluation untuk keperluan pertanggungjawaban. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggung jawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang

mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian suatu objek adalah:

1. Kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai.
2. Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan.
3. Ketepatan efektivitas program.
4. Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan tujuan penting lainnya.

B. Format Monitoring dan Evaluasi Rencana Bisnis Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta

Selama ini pengembangan klaster industri masih berjalan secara sporadis dan belum terorganisir secara baik; meskipun telah terorganisir akan tetapi masih belum mampu menjalankan fungsi koordinasi dalam pengembangan sentra secara holistik. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan sentra industri di Kota Surakarta atau dengan kata lain, keterlibatan pemerintah dan swasta seharusnya hanya sebatas memfasilitasi, memotivasi serta memberikan dorongan dan arahan kepada masyarakat sebagai pelaku dalam pengembangan sentra industri yang mereka miliki.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan membawa tuntutan bagi partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama

dari *stakeholders* terkait dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata.

Form monitoring dan evaluasi rencana bisnis sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta dilakukan secara komprehensif dan partisipatif melalui pelibatan unsur pemerintah dan pelaku usaha. Konsep partisipasi merupakan keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Menurut Tikson (2001) partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Format monitoring dan evaluasi pembangunan pembangunan sentra industri ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Form Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Pengembangan Sentra
Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta dari Sisi Pemerintah

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS OPD												
1.	Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri	Jumlah Pesngusaha yang sudah tersosialisasi	Kegiatan	1		1		1		1		Dinas Perdagangan
	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan Disperindag Kota Surakarta.	Lembar	15.800		16.000		16.300		16.500		Dinas Perdagangan
		Jumlah UDKM yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Pelatihan Ekspor.	UDKM	120,000		130,000		130,000		130,000		Dinas Perdagangan
2.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Solo Great Sale dan Penyelenggaraan Pameran lainnya	Kegiatan	1		1		1		1		Dinas Perdagangan
3.	Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri	Jumlah UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk.	Orang	40		44		46		50		Dinas Perdagangan
4.	Pengembangan sarana pemasaran	Jejaring Pemasaran Bagi UMKM	Kegiatan	2		2		2		2		Dinas Koperasi UMKM

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah											
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang mengikuti promosi produk	UMKM	20		20		25		25		Dinas Koperasi UMKM
5.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	UMKM yang terfasilitasi dengan lembaga pembiayaan	UMKM	100		100		100		100		Dinas Koperasi UMKM
6.	Pengembangan klaster bisnis	Klaster UMKM yang berdaya saing	Kelompok	6		5		5		5		Dinas Koperasi UMKM
7.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan industri untuk meningkatkan kualitas produksi dan berdaya saing tinggi.	IKM	120		120		120		120		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM yang mendapat pendampingan industri kreatif, partisipasi pameran, gelar kreativitas untuk IKM, Kunjungan kerja	IKM	45		50		60		60		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.	Pembinaan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapat Fasilitas	IKM	67		74		81		88		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustria

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	dalam memperkuat jaringan klaster industri	pendaftaran : HAKI, SNI, serta pameran. Kunjungan kerja, lomba kreatifitas untuk IKM.										n
	Kegiatan Pemberian fasilitasi kemudahan akses Perbankan Bagi IKM	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan IKM Award. Pamern Batik Carnival/Fashion On the street, Pameran Munas HUT Dekranasda, Pameran Solo Raya Kreatif Expo, Pameran dalam rangka kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Pameran Lainnya, Rakor dan Kunjungan Kerja Konsultasi	Kegiatan	1		1		1		1		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustria n
10.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan	Perizinan usaha makanan minuman	Buah	150		150		150		150		Dinas Kesehatan
11.	Pembangunan jalan	Peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif	m ²	3.500		3.500		3.500		3.500		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 6.2.
Form Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Pengembangan Sentra
Industri Kecil dan Menengah Kota Surakarta dari Sisi Pelaku Usaha

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
RENCANA AKSI KLASTER												
A.	Sentra Batik											
	Konsep Bisnis Bersama											
1.	Pembentukan asosiasi batik	Jumlah asosiasi batik yang terbentuk/ reorganisasi	Unit	1							1	
2.	Pertemuan pengembangan pasar bersama dengan asosiasi	Kesepakatan bersama tentang pengembangan pasar	MoU			1						
3.	Penyusunan mekanisme sub-kontraktor dalam penyelesaian order besar.	Jumlah kerjasama sub-kontraktor yang terbangun	MoU			1						
	Rencana kegiatan usaha bersama											
4.	Pelatihan desain batik	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	1		1		1		1		
5.	Pembuatan IPAL Komunal bagi pelaku usaha yang belum memiliki instalasi limbah	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit					1				
6.	Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil	Unit	10		10		10		10		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		pelatihan										
7.	Sertifikasi produk sesuai dengan standar	Jumlah produk yang telah tersertifikasi	Produk			10				10		
Rencana pemasaran												
8.	Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	10		10		10		10		
9.	Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
10.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
11.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
12.	Pembangunan sentra promosi batik secara mandiri oleh	sentra promosi batik terpadu yang terbangun	Unit							10		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	asosiasi											
Rencana keuangan												
13.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	30		30		30		30		
14.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	30		30		30		30		
B. Sentra Makanan												
Konsep bisnis bersama												
1.	Pembentukan asosiasi klaster makanan	Jumlah asosiasi batik yang terbentuk	Unit	1						1		
Rencana kegiatan usaha bersama												
2.	Pelatihan diversifikasi produk	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	1		1		1		1		
3.	Pembuatan IPAL Komunal bagi pelaku usaha yang belum memiliki instalasi limbah	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit					1				
4.	Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	10		10		10		10		
5.	Pengenalan alat produksi ramah lingkungan dan	Jumlah usaha yang telah menerapkan TTG	Unit	10		10		10		10		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	tepat guna	dan ARL										
6.	Sertifikasi produk untuk mendapatkan P-IRT, Sertifikasi Halal, dan Aman dari BPOM	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan sertifikasi produk	Unit	10		10		10		10		
Rencana pemasaran												
7.	Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	10		10		10		10		
8.	Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
9.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
10.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.	Kerjasama kepada penyalur/distributor produk pada beberapa toko penjual makanan	Jumlah unit usaha yang telah memiliki jalur distribusi produk	Unit	10		10		10		10		
Rencana keuangan												
12.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	10		10		10		10		
13.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	10		10		10		10		
C. Sentra Peralatan Rumah Tangga												
Konsep bisnis bersama												
1.	Pembentukan asosiasi klaster peralatan rumah tangga	Jumlah asosiasi peralatan rumah tangga yang terbentuk	Unit	1						1		
Rencana kegiatan usaha bersama												
2.	Pelatihan pengembangan desain produk	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	5		5		5		5		
3.	Pengenalan alat produksi ramah lingkungan dan tepat guna	Jumlah usaha yang telah menerapkan TTG dan ARL	Unit	5		5		5		5		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rencana pemasaran												
4.	Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	5		5		5		5		
5.	Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Unit	5		5		5		5		
6.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	5		5		5		5		
7.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	5		5		5		5		
8.	Kerjasama kepada penyalur/distributor produk pada beberapa toko penjual alat rumah tangga	Jumlah unit usaha yang telah memiliki jalur distribusi produk	Unit	5		5		5		5		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rencana keuangan												
9.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	20		20		20		20		
10.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	20		20		20		20		
D. Sentra Shuttle Cock												
Konsep bisnis bersama												
1.	Reorganisasi asosiasi <i>shuttle cock</i>	Jumlah asosiasi <i>shuttle cock</i> yang terbentuk	Unit	1						1		
2.	Pertemuan pengembangan pasar bersama dengan asosiasi	Kesepakatan bersama tentang pengembangan pasar	MoU			1						
3.	Rapat koordinasi penentuan Harga Standar Pasar	SSH yang disepakati	MoU	1		1		1		1		
4.	Penyusunan mekanisme sub-kontraktor dalam penyelesaian order besar.	Jumlah kerjasama sub-kontraktor yang terbangun	MoU			1						

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rencana kegiatan usaha bersama												
5.	Pelatihan dalam pembuatan <i>package design</i>	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	10		10		10		10		
6.	Sertifikasi produk sesuai dengan SNI	Jumlah produk yang telah tersertifikasi	Produk			5				5		
Rencana pemasaran												
7.	Pemasaran produk secara kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	10		10		10		10		
8.	Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
9.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		
10.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	10		10		10		10		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.	Membangun kerjasama dengan Institusi olahraga Badminton	Jumlah unit usaha yang telah memiliki jalur distribusi produk	Unit			10				10		
Rencana keuangan												
12.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	10		10		10		10		
13.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	10		10		10		10		
E. Sentra Sangkar Burung												
Rencana kegiatan usaha bersama												
1.	Pelatihan desain sangkar burung	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	15		15		15		15		
2.	Pelatihan produksi sangkar burung	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	15		15		15		15		
3.	Pelatihan penggunaan dan penerapan alat produksi modern dan tepat guna	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil TTG dan ARL	Unit			15						
Rencana pemasaran												

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.	Pemasaran produk secara personal maupun kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	15		15		15		15		
5.	Pelatihan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui media <i>daring</i>	Unit	15		15		15		15		
6.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	15		15		15		15		
7.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	15		15		15		15		
8.	<i>Personal dan direct selling</i>	Jumlah unit usaha yang telah memiliki jalur distribusi produk	Unit	15		15		15		15		
Rencana keuangan												
9.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	15		15		15		15		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	15		15		15		15		
F.	Sentra Mebel											
	Rencana kegiatan usaha bersama											
1.	Pelatihan desain mebel	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	7		7		7		7		
2.	Pelatihan produksi mebel	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan	Unit	7		7		7		7		
3.	Pelatihan penggunaan alat produksi modern dan tepat guna	Jumlah usaha yang telah menerapkan hasil TTG dan ARL	Unit			7						
	Rencana pemasaran											
4.	Pemasaran produk secara personal maupun kolektif pada event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti kegiatan promosi	Unit	7		7		7		7		
5.	Pelatihan pemasaran melalui media	Jumlah unit usaha yang melakukan	Unit	7		7		7		7		

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	<i>daring</i>	pemasaran melalui media <i>daring</i>										
6.	Pelatihan kerjasama pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang bekerjasama dalam pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	7		7		7		7		
7.	Pelatihan mekanisme pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Jumlah unit usaha yang melakukan pemasaran melalui platform <i>daring</i>	Unit	7		7		7		7		
8.	<i>Personal</i> dan <i>direct selling</i>	Jumlah unit usaha yang telah memiliki jalur distribusi produk	Unit	7		7		7		7		
Rencana keuangan												
9.	Temu pengusaha dan perbankan (permodalan)	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Unit	7		7		7		7		
10.	Pelatihan pengelolaan keuangan	Jumlah UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi	Unit	7		7		7		7		